

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (SMK3) PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
(Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**INFA ENGGARATIH
NIM : 145010101111129**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)**

(Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang)

INFA ENGGARATIH

NIM : 145010101111129

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 12 Desember 2018 dan disahkan pada tanggal.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ratih Dheviana Puru HT, SH., LL.M.
NIP. 19790728 200502 2 001

Syahrul Sajidin, S.H., M.H.
NIP. 19880806 201504 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Kepala Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti karya ilmiah ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 2 Desember 2018
Yang Menyatakan,

INFA ENGGARATHI
NIM. 14501010111129



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Ratih Dheviana Puru HT, SH., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, waktu dan segala masukan yang diberikan kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
4. Bapak Syahrul Sajidin, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan selama KKN hingga penyusunan skripsi, segala masukan yang berarti sangat baik dan motivasinya.
5. Bapak Jonika Putra dan Ibu Itnawati Suningsih, selaku kedua orang tua saya tercinta, selalu memberikan dukungan secara maksimal untuk penulis.
6. Adis, Dede, Lia, Mega, Nyala, Cak Drahmo, Andri, Jeni, Kak Pungky selaku teman-teman terbaik, yang selalu membimbing, memberikan arahan yang membangun, semangat, masukan serta informasi yang seringkali terlewatkan dari pengetahuan penulis.
7. Dedek Putri, Vivi, Musi, Muhamad Syauqi selaku "tim selalu ada", seperantauan yang selalu membantu penulis sebagai pemberi semangat dan bersedia membantu segala keperluan terkait penelitian ini.
8. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai demi tercukupinya data dalam penyelesaian skripsi ini. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini. Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2018

Infa Enggaratih



RINGKASAN

Infa Enggaratih, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2018. **PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) (Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang)** Ratih Dheviana Puru HT, SH., LL.M , Syahrul Sajidin, SH., MH.

Melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Sebagai salah satu tempat dengan tingkat resiko keadaan darurat seperti kerusakan pompa tangki bensin, tumpahan minyak, percikan api, serta kebakaran, maupun kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja, SPBU digolongkan sebagai sektor industri yang potensi bahaya yang tinggi karena berhubungan langsung dengan bahan kimia yang bersifat flammable (mudah terbakar) seperti bensin dan explosive (mudah meledak) seperti tangki. Penerapan SMK3 sebagai upaya pencegahan (*Preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat dari hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan di SPBU yang berada di Kota Malang, ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina Retail sebagai pengelola SPBU mengenai SMK3 telah diberlakukan, namun kejelasan atas pencapaian dari penerapan SMK3 tersebut kurang dilakukan evaluasi secara berkala, serta masih terdapat banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerapan SMK3 yang diterapkan oleh SPBU di Kota Malang dan faktor apa saja yang menyebabkan penerapan SMK3 pada SPBU menjadi terhambat, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SMK3.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SMK3 pada SPBU yang berada di Kota Malang sudah dijalankan sesuai dengan standar operasional PT. Pertamina Retail sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan nasional penerapan SMK3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan SMK3 tersebut belum berjalan dengan efektif, karena terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu; Substansi Hukum, Struktur Hukum yang berkaitan dengan pemerintah dan Departemen penanggungjawab SMK3 pada SPBU. Serta Kultur Hukum yang berkaitan dengan pekerja dan pengusaha.

SUMMARY

InfraEnggaratih, Labor Law, Faculty of Law, Brawijaya University, December 2018. **IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (OHSMS) IN PUBLIC REFUELING STATIONS (A Study in Public Refueling Stations of Malang City)**, RatihDhevianaPuru HT, SH., LL.M, SyahrulSajidin, SH., MH.

Protecting the safety and health of workers is an action that aims to increase optimal work productivity. As one of the places with the risk of emergencies such as damage to the gas tank pumps, oil spills, sparks, and fires, or accidents that can occur at any time, gas stations are classified as industrial sectors with high potential hazards because they are directly related to chemicals flammable such as gasoline and explosive like a tank. The application of SMK3 as a preventative effort (Preventive) for the emergence of workplace accidents and diseases as a result of work relations in the work environment by identifying things that have the potential to cause workplace accidents and illnesses due to work relations, and anticipatory actions when such matters occur. Based on the pre survey that the author did at the gas station located in the city of Malang, the conditions set by PT. Pertamina Retail as the manager of the gas station on SMK3 has been implemented, but the clarity of the achievement of the implementation of the SMK3 has not been regularly evaluated, and there are still many issues that arise in its implementation.

Based on the above background, the legal problems raised in this study are how the form of the implementation of SMK3 applied by gas stations in Malang City and what factors cause the implementation of SMK3 at SPBUs are hampered, and what efforts are made to overcome obstacles in the implementation of SMK3.

To answer the question above, empirical legal research uses a sociological juridical approach.

From the results of this study it can be concluded that the application of SMK3 at gas stations located in Malang City has been carried out in accordance with the operational standards of PT. Pertamina Retail as stipulated in the national policy on the implementation of SMK3 in Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of SMK3. But in its implementation, the application of the SMK3 has not been effective, because there are several inhibiting factors, namely; Legal Substance, Legal Structure relating to the government and the Department responsible for SMK3 at the SPBU. As well as legal culture related to workers and employers.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum	18
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	27
C. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	29
D. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Penelusuran Data	35
F. Populasi dan Sampel	36
G. Teknik Analisis	37
H. Defisini Operasional	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Penerapan SMK3 pada SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	48
C. Faktor Penghambat Penerapan SMK3 pada SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	72
D. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Penerapan SMK3 pada SPBU	

di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	90
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Tabel Orisinalitas	12
Tabel 4.1 Daftar SPBU di Kota Malang	42
Tabel 4.2 Data Jumlah Pekerja SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan perlindungan demi terciptanya produktivitas pekerja perlu dilakukan oleh setiap perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan di bawah naungan negara. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan bertujuan agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penggunaan biaya yang sia-sia dan target perusahaan dapat dicapai dengan maksimal serta meminimalisir kerugian. Dapat diartikan bahwa pekerja sebagai aset yang bernilai bagi perusahaan wajib untuk dijaga, dipelihara, dan dipertahankan keberadaannya karena kemajuan perusahaan dapat dilihat dari prestasi yang diberikan oleh pekerja.

Banyak bentuk-bentuk peningkatan produktivitas yang diperoleh setiap pekerja dari perusahaan, mulai dari perlindungan kerja, waktu kerja, upah, jaminan sosial tenaga kerja hingga keselamatan dan kesejahteraan kerja. Kebijakan tentang perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan para pekerja yang selanjutnya disebut (K3)¹, perlindungan yang bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja. K3 merupakan bentuk

¹Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut **Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993** keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Edwin B. Flippo adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat (spesifik), penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda dan hukuman-hukuman lain.

perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat yang disebabkan dari aktivitas kerja, memiliki jangkauan berupa terciptanya efisiensi perusahaan² secara maksimal guna mencegah dampak negatif yang akan timbul pada perusahaan tersebut, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas K3 ditempat kerja adalah pimpinan perusahaan atau pengurus³. Ringkasnya, K3 ialah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*Preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat dari hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Melindungi keselamatan para pekerja merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat⁴ ada lebih dari 123.000 kasus kecelakaan kerja terjadi di Indonesia selama tahun 2017. Jumlah ini meningkat sekitar 20,3% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Direktur Pelayanan BPJS

²Menurut **Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

³ Tertulis dalam Pasal 1 ayat 2 **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**, "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

⁴ Dikutip dari media berita online berkabar.id <https://www.berkabar.id/kabar/25502/dirut-bpjs-ketenagakerjaan-angka-kecelakaan-kerja-2017-naik-20> dan <https://finance.detik.com/moneter/d-3853101/angka-kecelakaan-kerja-ri-meningkat-ke-123-ribu-kasus-di-2017> dikutip pada 8 November 2018 pukul 19.41 WIB

Ketenagakerjaan menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya memperkecil angka kecelakaan kerja melalui K3, upaya ini juga memerlukan dukungan dari para pekerja untuk lebih mengutamakan keselamatan saat bekerja.⁵ Hal ini juga diamini oleh Agus Susanto yang merupakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, menerapkan SMK3 ini sangatlah penting mengingat di awal 2018 telah diwarnai sejumlah kasus kecelakaan kerja yang menonjol, seperti jatuhnya crane proyek Double-Double Track (DDT) di Jatinegara, Jakarta Timur pada saat itu⁶.

Kecelakaan kerja terjadi disebabkan karena perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman ditempat kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi paling banyak disebabkan karena perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. Sebab kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pekerja, namun juga pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sekitar, SMK3 diharapkan mampu meningkatkan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan dalam menciptakan sasaran dan tujuan setiap perusahaan. Karena umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Tindakan yang tidak aman dari manusia seperti sengaja mengabaikan peraturan tentang K3 yang telah ditetapkan, serta tidak memiliki kecukupan ilmu dan keterampilan. Faktor lingkungan yaitu kondisi peralatan berbahaya yang membutuhkan pengamanan.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Peraturan mengenai penerapan SMK3 pada perusahaan diharapkan mampu menjadi *monitor* kebijakan K3 yang diterapkan oleh setiap perusahaan secara sistematis meliputi penetapan terhadap kebijakan K3, perencanaan terhadap K3, pelaksanaan atas rencana K3 tersebut, pemantuan dan evaluasi kinerja K3, serta penunjaan dan peningkatan terhadap kinerja SMK3 yang bertujuan agar mampu menurunkan angka kecelakaan yang semakin meningkat di bidang ketenagakerjaan. Karena kecelakaan kerja merupakan pengaruh yang signifikan dalam penurunan produktifitas pekerja.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan tersebut mempertegas istilah K3 sebagai salah satu hak berupa perlindungan yang harus dimiliki oleh setiap pekerja. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut;

Pasal 86 ayt (1) berbunyi “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 86 ayat (2) berbunyi: “untuk melindungi keselamatan pekerja/burh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Pasal 86 ayat (3) berbunyi: “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 87 ayat (1) berbunyi: “setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (2) berbunyi: ketentuan mengenai penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Program K3 bereformasi dengan kebijakan yang lebih baik lagi melalui suatu sistem yang lebih terstruktur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 87 tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, selanjutnya disebut SMK3 sebagai pedoman dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara lebih terstruktur. Selain merupakan tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja, tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya.⁷ Karena tujuan penerapan SMK3 sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

Pasal 2 berbunyi⁸: 1) “Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.” 2) “Mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan: manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja.” 3) “Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.”

Merujuk pada ketentuan tersebut maka setiap pekerja wajib untuk mentaati peraturan yang ada di tempat kerja masing-masing dengan tujuan untuk keselamatan ditempat kerja. Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)⁹ yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Berdasarkan pasal 5 Peraturan

⁷Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 75.

⁸Tercantum dalam pasal 2 **Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3**

⁹Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan guna mengendalikn risiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012).

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 5 berbunyi: “(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya”.

(2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

- a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
- b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

(3) “Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

(4) “Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.”

SMK3 merupakan bagian dari suatu sistem manajemen yang wajib diterapkan oleh pengusaha bagi setiap perusahaan secara terstruktur dalam rangka pengendalian resiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Meskipun Peraturan Pemerintah mengenai SMK3 telah berlaku, namun dapat dilihat, angka kecelakaan kerja di Indonesia dirasa cukup tinggi. Dalam melaksanakan penerapan SMK3 ditempat kerja, pekerja diwajibkan untuk menaati dan melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku, dan setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan K3 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sebagai perusahaan terbesar pengelola sektor minyak bumi dan gas di Indonesia, PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang menerapkan SMK3 secara terintegrasi melalui departemen khusus yang fokus kepada implementasi SMK3, yaitu Departemen HSE (*Health,*

Safety, Environment). Istilah HSE tersebut menggantikan istilah K3LL (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan) yang sebelumnya. Sebagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, penerapan SMK3 yang diterapkan oleh PT. Pertamina memperhatikan Lindung Lingkungan, yang dikenal dengan SMK3L melalui sistem manajemen HSE secara konsisten dan mencakup seluruh dimensi SMK3L. Penerapan SMK3L yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina tersebut dilaksanakan dan berlaku hingga ke anak perusahaannya, termasuk oleh PT. Pertamina Retail yang bergerak di sektor perdagangan dan pengangkutan Bahan Bakar Kendaraan selanjutnya disebut BBM. PT. Pertamina Retail beserta manajemen terkait pengoperasian SPBU sangat memperhatikan aspek K3 dalam bekerja dan beraktivitas ditempat kerja. Berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan serta keahlian para pekerjanya.

Health, PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam mengelola SPBU menjamin setiap pekerjanya untuk dapat bekerja secara sehat dengan gaya hidup yang sehat agar menciptakan lingkungan tempat kerja yang sehat agar mampu mendukung kesehatan para pekerjanya guna mencegah penyakit akibat kerja. *Safety*, PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam mengelola SPBU untuk memperhatikan aspek K3 dalam bekerja dan beraktivitas sebagai prioritas utama disamping mengejar tujuan perusahaan dalam hal produksi agar terciptanya suasana kerja yang kondusif dan menghilangkan resiko kecelakaan kerja sehingga angka kecelakaan menjadi nihil. *Environtmen*, PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam

mengelola SPBU menjadikan lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar sebagai salah satu prioritas penting meskipun SPBU melakukan proses distribusi dan penyimpanan bahan bakar, PT. Pertamina Retail tetap memperhatikan aspek yang ramah lingkungan, tanpa pencemaran, maupun limbah beracun agar lingkungan tersebut terhindar dari pencemaran lingkungan, tumpahan minyak, dan berkomitmen dalam pemakaian energi.

Membahas HSE berarti tidak hanya mencakup mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup hubungan terhadap pekerja, identifikasi bahaya, analisis dan evaluasi risiko, pengendalian sesuai ketentuan termasuk pencegahan kecelakaan kerja apabila terjadi kasus kecelakaan kerja yang disebabkan kesalahan prosedur maupun kesalahan pekerja itu sendiri, karena keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut tingkah laku yang tidak aman dan keadaan lingkungan yang tidak aman.

PT. Pertamina Retail merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina yang bertugas mengelola sektor industri yang memperdagangkan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau yang selanjutnya disebut sebagai SPBU. Sebagai salah satu tempat dengan tingkat risiko keadaan darurat seperti kerusakan pompa tangki bensin maupun kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja, seperti tumpahan minyak, percikan api, serta kebakaran, SPBU digolongkan sebagai sektor industri yang potensi bahaya yang tinggi karena berhubungan langsung dengan alat pengisian bahan bakar berbentuk pompa, tangki pendam, gas elpiji serta bahan kimia yang bersifat *flammable* (mudah terbakar) seperti

bensin dan *explosive* (mudah meledak) seperti tangki. PT. Pertamina Retail sejak 2009 telah menerapkan SMK3L berupa kebijakan HSE sesuai dengan ketentuan yang telah memenuhi persyaratan lokal maupun internasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT. Pertamina, yang mana proses penerapan tersebut selalu di *monitoring* secara langsung oleh petugas infeksi HSE dari PT. Pertamina.

Selain SPBU sebagai tempat pengisian bahan bakar kendaraan, sudah menjadi rahasia umum bahwa SPBU juga salah satu pilihan masyarakat untuk menjadi lokasi *meeting point* sebelum bepergian jauh. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang dimiliki SPBU semakin beragam, umumnya, SPBU di Indonesia menjual beberapa jenis produk dan bahan bakar antara lain; pertamax, pertamax dex, solar, bio solar, pertalite, dan premium. Fasilitas tambahan lainnya adalah dilengkapi dengan *rest area*, toilet, musholah, *mini market*, penambah angin nitrogen, *counter turbo* pulsa dan paket data, *service* oli kendaraan, ATM, serta toko oleh-oleh khas daerah tertentu.

Seperti kota lain pada umumnya, kota Malang memiliki SPBU yang tersebar di beberapa kecamatan, ada 27 (dua puluh tujuh) SPBU yang beroperasi di kota Malang. Sebagai kecamatan yang dikelilingi berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, kecamatan Lowokwaru memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, membuat banyak jasa dan layanan yang beroperasi hampir 24 jam, tidak terkecuali SPBU. Dari 27 SPBU yang beroperasi di kota Malang, 4 (empat) SPBU diantaranya

berada di kecamatan Lowokwaru kota Malang, yakni; 2 (dua) SPBU di desa Tlogomas, 1 (satu) di kelurahan Mojolangu, dan 1 (satu) kelurahan Sumbersari.

SPBU tersebut memperkerjakan tenaga kerja dengan rata-rata usia 19 (sembilan belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.¹⁰ Beroperasi 24 jam. *Shift* jam kerja dibagi atas 3 yakni; *pertama*, pukul 06.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB, *kedua*, pukul 14.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, *ketiga* pukul 22.00 WIB sampai dengan 06.30 WIB¹¹. Dengan jam kerja dan tingkat potensi bahaya yang tinggi, pekerja SPBU layak mendapatkan perlindungan melalui penerapan SMK3 yang terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan, menurut pengakuan salah satu pengurus SPBU 54.651.05 Tlogomas kota Malang mengatakan SMK3 diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina, namun kejelasan atas pencapaian dari penerapan SMK3 tersebut kurang dilakukan evaluasi secara berkala dan belum sepenuhnya tertanam dalam diri para pekerja secara penuh. Meskipun pihak pengurus telah mempertegas ketentuan SMK3 tersebut, karena tidak adanya sistem *punishment* menjadi salah satu faktor bagi pekerja untuk tidak mematuhi pengaturan mengenai K3 yang telah ditetapkan. Selama bekerja, banyak dijumpai para pekerja yang menggunakan sepatu *sneakers* dan pantofel saat bekerja sebagai operator SPBU.

¹⁰ Hasil wawancara pra-survey yang penulis lakukan di SPBU Tlogomas pada 12 ebruari 2018 pukul 15.12 WIB.

¹¹ Ibid

Contohnya, pernah ada kecelakaan kecil yang terjadi, karena kelalaian menggunakan alat pelindung kaki berupa sepatu *safety*, seorang pekerja yang terluka di bagian kaki karena tertimpa tabung gas 3 kg saat pemindahan tabung gas dari tangki gas menuju gudang penyimpanan gas. Selain itu, beberapa operator mesin pompa mengatakan bahwa berkeinginan menggunakan masker saat sedang bekerja karena seringkali merasakan mual dan terkadang merasa sesak nafas karena bau yang cukup kuat dari bensin yang terhidup. Namun yang terjadi dilapangan, perusahaan menghimbau untuk tidak menggunakan masker bagi pekerja operator SPBU, didalam SOP (Standar Operasional Perusahaan) pun tidak ada ketentuan penggunaan APD pernafasan maupun APD tangan. *Supervisor* memberikan pengecualian saat sedang dalam keadaan sakit, pekerja diperbolehkan menggunakan masker, dengan pertimbangan bahwa menggunakan masker saat mengoperasikan pompa bensin dan berinteraksi dengan konsumen, memberikan kesan tidak ramah terhadap konsumen.¹²

Dari beberapa permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, penulis ingin menganalisis penerapan SMK3 pada SPBU yang ada di Kota Malang, serta penulis juga memerlukan pengetahuan apa yang menjadi penghambat serta upaya dalam penerapan K3 pada pekerja SPBU di kota Malang. Mengingat SPBU yang ada di kecamatan Lowokwaru kota Malang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam serta memiliki tingkat potensi bahaya yang cukup tinggi bagi keselamatan dan kesehatan para kerja.

¹²Hasil wawancara penulis dengan Sulistyio (37 tahun), selaku operator SPBU Tlogomas, tanggal 12 Februari pukul 19.00

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, peneliti akan melakukan penelitian hukum dengan judul: PELAKSANAAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) (Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kota Malang).

Penelitian terdahulu yang akan dipaparkan berikut juga dapat dijadikan sebagai penelitian pembanding terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian yang dimaksud antara lain:

Tabel 1. Orisinalitas Penulisan

Tahun Penelitian	Nama Penelitian & Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan (Perbedaan)
2012	Angga Kurniawan A.P (Fakultas Hukum UIR)	PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA PEKANBARU	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru ? 2. Bagaimana upaya dan hambatan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan	Penelitian ini membahas mengenai bentuk implementasi K3 pada pekerja SPBU kota Pekanbaru. Serta hanya membahas mengenai upaya dari adanya K3 yang diterapkan SPBU kelurahan Tangkerang kota Pekanbaru tidak terlaksana.

			kerja terhadap pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kelurahan Tangkerang tengah kota Pekanbaru tidak terlaksana?	
--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Malang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan SMK3 pada pekerja SPBU, khususnya SPBU di kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan ilmu hukum khususnya hukum perburuhan dan bagi penelitian yang serupa secara mendalam. Selain itu, penulis berharap penelitian ini juga bermanfaat bagi:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan untuk mempertegas perlunya disiplin melaksanakan serta menerapkan K3 selama berada ditempat kerja, untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Selain itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk semakin memaksimalkan pelaksanaan K3, karena PT Pertamina merupakan perusahaan tunggal yang bergerak mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia.

b. Bagi Pekerja/ operator SPBU

Sebagai acuan, referensi, dan ilmu pengetahuan yang perlu untuk diterapkan, dimaksimalkan secara berkala dan terus menerus guna mengurangi akibat dari mengabaikan K3. Walaupun terkadang penyebabnya tidak terlihat sekarang, namun akan berdampak dikemudian hari dan merugikan pekerja/ operator.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan untuk segala lapisan masyarakat bahwa sebagai konsumen, masyarakat perlu untuk menaati tiap rambu yang dibuat di SPBU dan tidak menyepelakan perbuatan kecil yang dapat mengancam nyawa seseorang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang selanjutnya dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas lebih lanjut teori dan istilah hukum yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Dalam menyusun bab ini, penulis mencari dan menganalisis berbagai sumber bacaan

yang diperoleh dari berbagai sumber, melalui peraturan perundang-undangan, buku, artikel hukum, jurnal hukum, situs internet. Manfaat dari bab ini adalah membantu dan mempermudah penulis untuk menggunakan pisau analisis yang tepat terhadap hasil penelitiannya kedalam pembahasan permasalahan dari penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait dengan metode-metode ilmiah yang digunakan agar mendapatkan informasi yang valid, tujuannya adalah dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada saat tertentu dapat penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, populasi sampel, teknik memperoleh bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN

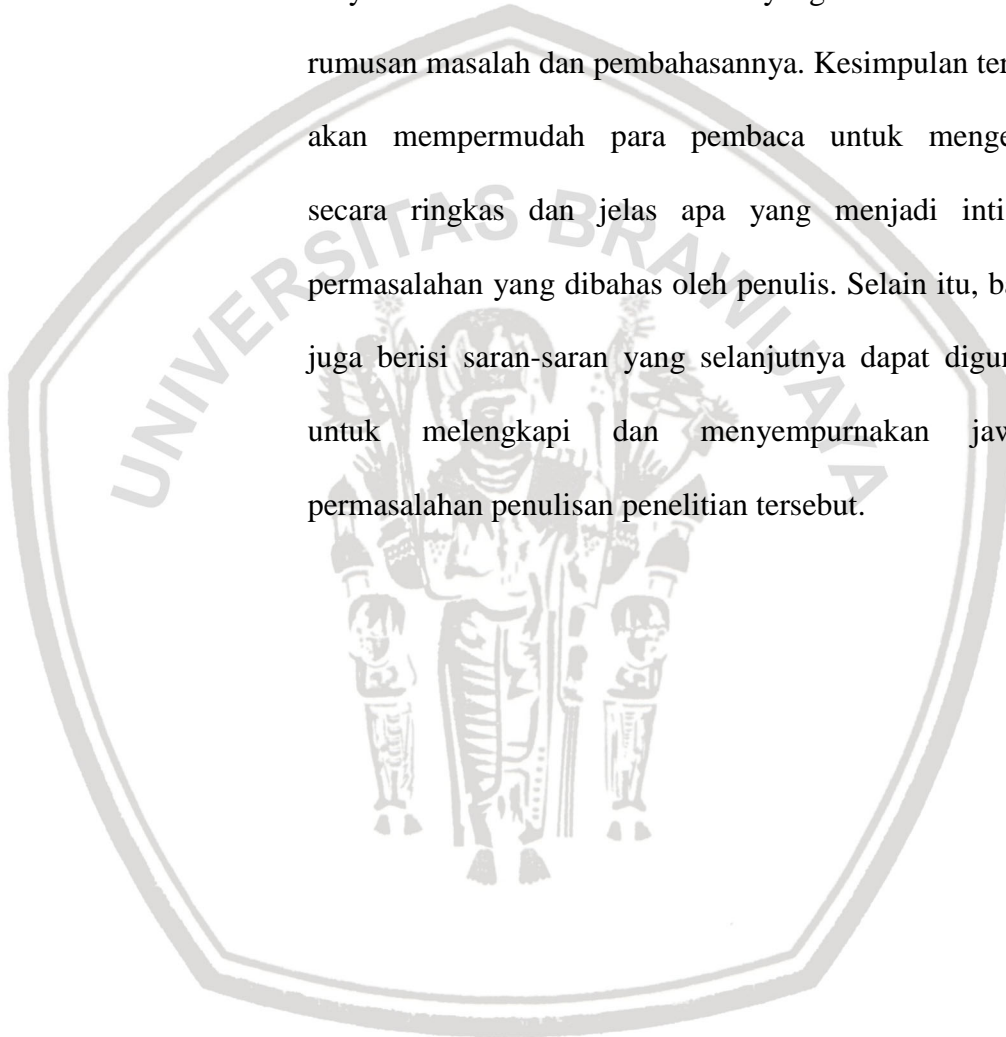
Bab ini merupakan bab yang menjadi pokok bahasan dari suatu penelitian. Bab Hasil dan Pembahasan berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan topik permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hasil dan pembahasan ini disusun secara sistematis dan praktis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. digunakan sebagai media untuk memahami, memecahkan, dan

BAB V

mengantisipasi masalah. Komponen dalam bab ini terdiri dari jenis

: PENUTUP

Sebagai bab terakhir, penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan gagasan dan ide penulisan penelitian ini yang dinyatakan secara keseluruhan yang didasarkan pada rumusan masalah dan pembahasannya. Kesimpulan tersebut akan mempermudah para pembaca untuk mengetahui secara ringkas dan jelas apa yang menjadi inti dari permasalahan yang dibahas oleh penulis. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang selanjutnya dapat digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban permasalahan penulisan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengetian Efektivitas

Efektivitas termasuk jenis kata benda, berasal dari kata dasar *efektif* yaitu, berarti kata sifat. Dengan kata lain '*ada efeknya*' yang berarti memiliki akibat, pengaruh, dapat membawa hasil.¹³ Dan tentang undang-undang maupun peraturan, efektif bermakna suatu hal yang mulai berlakunya dan memiliki pengaruh atau tidak. Efektivitas mengarah pada beberapa kepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya merupakan keadaan yang berpengaruh pada keberhasilan suatu usaha, manfaat, tindakan maupun hal yang berlaku.

Efektivitas adalah suatu indikator yang memberikan gambaran mengenai seberapa jauh target dapat dicapai. Jika efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.¹⁴ Dengan kata lain, apabila sebuah sesuatu dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tepat dan berhasil, maka sesuatu tersebut sudah berjalan dengan efektif dan efisien.

Dapat dilihat dari pengertian diatas, efektivitas mengandung maksud sebagai sebuah kegiatan serta tindakan yang disengaja,

¹³ Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, disusun oleh Pusat bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2003, hlm 284.

¹⁴ Sedarmayanti, **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**, 2009, hlm 59.

direncanakan, memiliki maksud untuk mencapai suatu tujuan yang sudah terencana dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuannya oleh instansi yang membuatnya. Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam maksud tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Ketika berbicara efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat menjadi barometer ukuran, apakah aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁵

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁶

¹⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.375

¹⁶ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu peraturan atas penegakan hukum tergantung pada tiga hal, yaitu; substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan) dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁷

a. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud adalah produk hukum materiil yang pelaksanaannya diwajibkan dan berlaku bagi seluruh aspek yang mencakupnya. Maksudnya adalah menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Maksudnya adalah menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian sebuah manfaat atas sasaran dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Achmad Ali berpendapat dalam bukunya bahwa “ketika kita ingin mengetahui efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat menjadi barometer ukuran, apakah aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”¹⁸ Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *America Law: An Introduction* (New York: W.W Norton and Company, 1984). Lawrence M. Friedman, *A History of America Law* (New York: Simon and Schuster) 1973.

¹⁸ Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1**, Jakarta; Kencana 2010, hlm 375

suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.¹⁹

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu; embaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan, Peraturan hukum yang jelas sistematis, Kesadaran hukum masyarakat tinggi.²⁰ Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menjelaskan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga klausa, meliputi:

1. Pada masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian,

¹⁹ Soleman B Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm 47-48.

²⁰ Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), **Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional**, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm 11.

pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.²¹

b. Struktur Hukum

Menentukan bahwa efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan tersebut diharuskan adanya aparat hukum yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Mencakup keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa, bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik karena adanya lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang sebagai penegak hukum.

Soerjono Soekanto²² juga berpendapat bahwa hal yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh apa petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas apa petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

²¹ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 305

²² Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 8.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh apakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas pada wewenangnya.

c. Kultur Hukum

Hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut berdampak baik dan positif, artinya adalah saat hukum tersebut mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Hukum dapat efektif bila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan sebaiknya. Berbicara mengenai sebuah aturan, daya ukur sebuah aturan hukum ialah mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Ukuran efektif tidaknya suatu produk hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat, apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh produk hukum tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau produk hukum tersebut telah tercapai.

Kultur hukum mengacu pada bagian yang ada pada adat kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk meninjau efektivitas

hukum dari segi faktor kebudayaan masyarakatnya dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal²³, antara lain:

1. Pengakuan yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumannya mempunyai kegunaan;
2. Ada atau tidaknya dipengaruhi dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negative ataupun positif;
3. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
4. Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkan dan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektifitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku manusia

Untuk faktor mengenai masyarakat dan kebudayaan memiliki kaitan satu sama lainnya, sebab kebudayaan merupakan hal yang dikerjakan dan dilakukan masyarakat. Dalam hal ini, kebiasaan membaca, kebiasaan untuk patuh terhadap aturan sulit diterapkan karena tidak adanya pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan.

B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pengertian K3

Pengertian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan

²³ Seorjono Seokanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 136

kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja²⁴ Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebuah bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum.²⁵

Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 168 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, lebih dari 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi²⁶.

Secara Keseluruhan atau secara garis besar pengertian K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan Kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk

²⁴Definisi di atas adalah definisi yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Selain definisi di atas, pakar atau organisasi lain juga ada yang mengajukan definisi K3.

²⁵Dikutip dari jurnal milik International Labour Organization (ILO) Jakarta http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai sarana untuk produktivitas. Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 19.24 WIB.

²⁶ *Ibid*

memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan melakukan pengukuran keamanan dan kesehatan yang efektif, semakin sedikit pegawai yang mengalami dampak penyakit jangka pendek atau jangka panjang akibat bekerja di perusahaan tersebut.”

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 menyatakan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 ialah segala kegiatan yang terkait untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”.²⁷ Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah meletakkan K3 sebagai bagian penting untuk dilindungi.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan (K3), dimana hal-hal yang mempengaruhi tersebut harus dapat menjadi perhatian perusahaan dalam mempekerjakan pekerjanya. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Alat-alat perlindungan kerja
- 2) Ruang kerja yang aman
- 3) Penggunaan peralatan kerja

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang **Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**. Pasal 1 ayat (1).

- 4) Ruang kerja yang sehat
- 5) Penerangan diruang kerja

2. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja termasuk dalam Perlindungan Teknis²⁸, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Program keselamatan kerja diadakan karena tiga alasan penting. Pertama, Berdasarkan perikemanusiaan, Pertama-tama para pengurus akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita luka serta keluarga.

Kedua, Berdasarkan Undang-Undang, da juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang federal, Undang-Undang Negara Bagian dan Undang-Undang kota perja tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan sebagian mereka melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda. Ketiga, Berdasarkan Ekonomi, alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Keselamatan kerja tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja juga kepada pengusaha dan juga pemerintah, yakni:

²⁸ **Perlindungan teknis** yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja.

- 1) Bagi pekerja, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja akan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
- 2) Bagi pengusaha, dengan adanya pengaturan keselamatan kerja diperusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
- 3) Bagi pemerintah, dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

3. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja termasuk jenis Perlindungan Sosial,²⁹ karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja “semaunya” tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Sifatnya yang membatasi,

²⁹Mengutip Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, **Hukum Kerja Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 84. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuan utamanya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga sebagai kesehatan kerja.

program kesehatan kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Dengan dibentuknya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama.³⁰

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja melakukan pekerjaannya. Pekerjaan maksudnya disini adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk pengusaha dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Adanya penekanan “dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semata tenaga kerja tidak melakukan hubungan kerja pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana dalam ketentuan Bab X Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.³¹

C. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pengertian secara umum mengenai system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ialah roses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam operasi perusahaan. Sesuai dengan pengertian SMK3 menurut pasal 1 Peraturan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

³⁰Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, **Hukum Kerja Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 85.

³¹ *Ibid*

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan guna mengendailkan risiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 tersebut meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan penijauan dan peningkatan kinerja SMK3.³²

Tujuan penerapan SMK3 adalah sebagai berikut³³:

- 1) “Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur dan terintegrasi”.
- 2) “Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan pengusaha”.
- 3) “Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.”

D. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun Pengisian Bensin Umum atau yang selanjutnya disebut sebagai SPBU merupakan sebuah sektor industri yang memperdagangkan minyak bumi dan gas yang dikelola oleh PT. Pertamina,. PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan besar yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia dan memiliki beberapa anak perusahaan salah satunya PT Pertamina Retail. PT Pertamina Retail ialah anak perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola SPBU di Indonesia. Sektor industri SPBU memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena berhubungan langsung dengan bahan yang mudah terbakar bahkan berpotensi terjadi ledakan. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan pekerja penting

³²Tercantum dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia.

³³Tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

untuk diterapkan pada setiap SPBU. Melihat berbagai kandungan pada bensin dapat membahayakan tubuh manusia yang senantiasa menghirupnya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar, pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar. Misalnya; pertamax, solar, pertalite, bio solar, pertamax dex, dan lainnya.

Selain SPBU sebagai tempat pengisian bahan bakar kendaraan, sudah menjadi rahasia umum bahwa SPBU juga salah satu pilihan masyarakat untuk menjadi lokasi *meeting point* sebelum bepergian jauh. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang dimiliki SPBU semakin beragam, umumnya, SPBU di Indonesia menjual beberapa jenis produk dan bahan bakar antara lain; pertamax, pertamax dex, solar, bio solar, pertalite, dan premium. Fasilitas tambahan lainnya adalah dilengkapi dengan *rest area*, toilet, musholah, *mini market*, penambah angin nitrogen, *counter turbo* pulsa dan paket data, *service* oli kendaraan, ATM, serta toko oleh-oleh khas daerah tertentu.

Sebagai perusahaan terbesar pengelola sektor minyak bumi dan gas di Indonesia, PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang menerapkan SMK3 secara terintegrasi melalui departemen khusus yang fokus kepada implementasi SMK3, yaitu Departemen HSE (*Health, Safety, Environment*). Istilah HSE tersebut menggantikan istilah K3LL (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan) yang sebelumnya. Sebagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, penerapan SMK3 yang diterapkan oleh PT. Pertamina memperhatikan Lindung Lingkungan, yang dikenal dengan SMK3L

melalui sistem manajemen HSE secara konsisten dan mencakup seluruh dimensi SMK3L.

Penerapan SMK3L yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina tersebut dilaksanakan dan berlaku hingga ke anak perusahaannya, termasuk oleh PT. Pertamina Retail yang bergerak di sektor perdagangan dan pengangkutan Bahan Bakar Kendaraan selanjutnya disebut BBM. PT. Pertamina Retail beserta manajemen terkait pengoperasian SPBU sangat memperhatikan aspek K3 dalam bekerja dan beraktivitas ditempat kerja. Berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan serta keahlian para pekerjanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dalam pendekatan hukum sebagai *low in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar dibuat sebagai sebuah keputusan pejabat, norma hukum tertulis, tetapi juga dapat memberikan makna sebagai suatu kenyataan, perilaku yang beraturan serta memiliki dampak.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan, yaitu Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Pendekatan yuridis normative adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke objek yaitu mengetahui penerapan SMK3 pada SPBU di Kota Malang.

Dengan pendekatan ini maka penulis mengharapkan adanya gambaran atas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada SPBU di Kota Malang, sudahkah ada kesesuaian dengan peraturan yang mengatur dan berlaku tentang penerapan SMK3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dikaitkan dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Dengan kata lain, kesesuaian antara *low in books* dengan *low actions* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di SPBU Kota Malang karena kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya, kota Malang menjadi salah satu kota yang tingkat aktivitas masyarakatnya cukup tinggi. Sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur, kota Malang semestinya mampu menerapkan disiplin ilmu dalam pelaksanaan K3 pada pekerja SPBU, agar mampu memberi contoh bagi kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, mengingat SPBU termasuk salah satu tempat yang selalu dicari dan dibutuhkan masyarakat. Kota Malang memiliki 27 (dua puluh tujuh) SPBU yang tersebar 5 (lima) kecamatan, 4 (empat) SPBU yang terletak di kecamatan Lowokwaru beroperasi 24 jam.

Berdasarkan pra survey yang telah penulis lakukan pada 4 (empat) SPBU di Kecamatan Lowokwaru tersebut, yakni 2 (dua) SPBU di desa Tlogomas, 1 (satu) di kelurahan Mojolangu, dan 1 (satu) kelurahan Sumber Sari, terdapat permasalahan mengenai penerapan SMK3 mengingat SPBU merupakan sektor industri yang memiliki tingkat potensi bahaya cukup tinggi bagi keselamatan dan kesehatan para kerja.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini digunakan sebagai pendukung informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pencarian informasi yang diambil dari narasumber terkait dengan penelitian mengenai penerapan SMK3 pada SPBU kota Malang.

2. Data sekunder

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- d. Literatur berupa buku ilmu hukum;
- e. Artikel dan kutipan para ahli hukum;
- f. Hasil-hasil penulisan ilmiah dan jurnal hukum;
- g. Media cetak maupun media elektronik; dan

E. Teknik Penelusuran Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelusuran data berupa:

1. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mencari data sebanyak-banyaknya berupa data primer dan sekunder yang dirangkai dan diselaraskan dengan keadaan yang ada dilapangan mengenai pelaksanaan SMK3 pada pekerja SPBU.

2. Teknik wawancara, yaitu dengan cara penulis turun langsung kelapangan dan mewawancarai narasumber terkait penelitian ini, penulis dalam penelitian ini mewawancarai operator SPBU serta *supervisor* dan *pengurus* pada SPBU di kota Malang.
3. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilaksanakan guna mengetahui kondisi langsung yang terjadi dilapangan dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dilakukan baik berupa manusia dan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan objek dari suatu penelitian.³⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah;

- a. Operator mesin pompa SPBU yang berada Kota Malang.
- b. *Supervisor* SPBU yang berada di Kota Malang.
- c. Manajer SPBU yang berada di Kota Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari poopulasi yang diteliti yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut.³⁵ Sampel merupakan prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan ciri yang dikehendaki populasi. Sampel

³⁴Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tasito, Bandung, 1985, hlm 93.

³⁵Hamidi, **Metode Penelitian dan teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 5.

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih *representative*³⁶ dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.³⁷ Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah;

- a. 8 (delapan) orang yang bekerja sebagai operator mesin pompa SPBU yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- b. 3 (tiga) *Supervisor* SPBU yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- c. 1 (satu) Manajer SPBU yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

G. Teknik Analisa Data

Jenis analisa data ini menggunakan penelitian deskriptif. Mendeskripsikan efektivitas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada SPBU kota Malang, teknik analisis datanya yang digunakan oleh penulis adalah teknik interaktif, dimana data-data tersebut di interpretasi, dianalisis kemudian dideskripsikan berdasarkan data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Pengolahan data akan dilakukan dengan cara mengkomparasikan atau dibandingkan antara data yang diperoleh dilapangan dengan teori-teori yang digunakan dalam hal-hal yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas dari Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu peraturan atas penegakan hukum tergantung pada tiga hal, yaitu; substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan) dan budaya hukum (*legal culture*)³⁸ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat menjadi barometer ukuran, apakah aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁹

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengertian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁴⁰ Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebuah bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

³⁸ Lawrence M. Friedman, *America Law: An Introduction* (New York: W.W Norton and Company, 1984). Lawrence M. Friedman, *A History of America Law* (New York: Simon and Schuster) 1973.

³⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 375

⁴⁰ Definisi di atas adalah definisi yang dicantumkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012** tentang Sistem Manajemen K3. Selain definisi di atas, pakar atau organisasi lain juga ada yang mengajukan definisi K3.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum.⁴¹



⁴¹Dikutip dari jurnal milik **International Labour Organization (ILO)** Jakarta http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai sarana untuk produktivitas. Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 19.24 WIB.

BAB IV

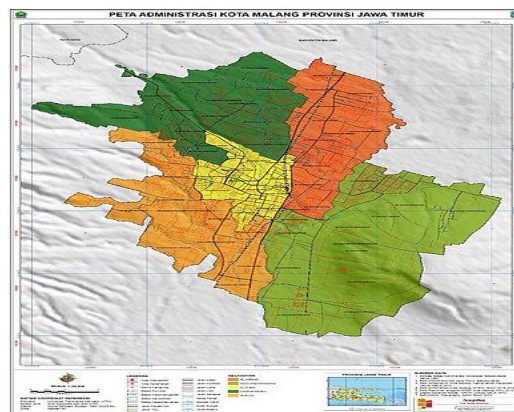
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Batas Wilayah Kota Malang

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 145.28 km². Kota Malang termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur dan kota terbesar ke 12 di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kota Malang semula memiliki 3 (tiga) wilayah Kecamatan, lalu di tata kembali menjadi 5 Kecamatan yang terdiri atas 57 Desa/Kelurahan.⁴²

Gambar 4.1 Peta kota Malang



⁴²Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang,

Secara administratif, lima Kecamatan yang dimaksud adalah, Kecamatan Blimbing dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Sukun di Kelurahan Sukun, Kecamatan Klojen di Kelurahan Klojen, dan Kecamatan Lowokwaru dengan pusat pemerintahannya di Kelurahan Lowokwaru. Berikut daftar Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Malang⁴³, yaitu:

- a. Kecamatan Blimbing, terdiri dari:
 1. Desa Balearjosari;
 2. Kelurahan Polowijen;
 3. Kelurahan Arjosari;
 4. Kelurahan Purwodadi;
 5. Kelurahan Blimbing;
 6. Kelurahan Pandanwangi;
 7. Kelurahan Purwantoro;
 8. Kelurahan Bunulrejo;
 9. Kelurahan Kesatrian;
 10. Kelurahan Polehan;
 11. Kelurahan Jodipan.
- b. Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari:
 1. Kelurahan Kotalama;
 2. Kelurahan Mergosono;
 3. Kelurahan Bumiayu;
 4. Kelurahan Wonokoyo;
 5. Kelurahan Buring;
 6. Kelurahan Kedungkandang;
 7. Kelurahan Lesanpuro;
 8. Kelurahan Sawojajar;
 9. Kelurahan Madyopuro;
 10. Desa Cemorokandang;
 11. Desa Arjowinangun;
 12. Desa Tlogowaru.
- c. Kecamatan Sukun, terdiri dari:
 1. Kelurahan Ciptomulyo;

⁴³ *Ibid*

2. Kelurahan Gadang;
 3. Kelurahan Kebonsari;
 4. Kelurahan Bandungrejosari;
 5. Kelurahan Sukun;
 6. Kelurahan Tanjungsrejo;
 7. Kelurahan Pisangcandi;
 8. Desa Karangbesuki;
 9. Desa Bandulan;
 10. Desa Mulyorejo;
 11. Desa Bakalan Krajan.
- d. Kecamatan Klojen, terdiri dari:
1. Kelurahan Klojen;
 2. Kelurahan Rampal Celaket;
 3. Kelurahan Samaan;
 4. Kelurahan Kiduldalem;
 5. Kelurahan Sukoharjo;
 6. Kelurahan Kasin;
 7. Kelurahan Kauman;
 8. Kelurahan Oro-oro Dowo;
 9. Kelurahan Bareng;
 10. Kelurahan Gadingkasri;
 11. Kelurahan Penanggungan.
- e. Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari:
1. Desa Tasikmadu;
 2. Desa Tunggulwulung;
 3. Desa Tlogomas;
 4. Desa Merjosari;
 5. Kelurahan Dinoyo;
 6. Kelurahan Sumbersari;
 7. Kelurahan Ketawanggede;
 8. Kelurahan Jatimulyo;
 9. Kelurahan Tunjungsekar;
 10. Kelurahan Mojolangu;
 11. Kelurahan Tulusrejo;
 12. Kelurahan Lowokwaru.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 mdpl (meter diatas permukaan air laut), dan merupakan salah satu kota wisata di Jawa Timur karena keindahan alam dan objek wisata yang dimiliki, tak

jarang bila akhir pekan tiba atau musim libur sekolah, kota Malang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

2. Gambaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Malang

Kecamatan Lowokwaru terdiri atas beberapa desa/kelurahan. Desa/kelurahan tersebut meliputi; Desa Tasikmadu, Desa Tunggulwulung, Desa Tlogomas, Desa Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Summersari, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tulusrejo, dan Kelurahan Lowokwaru. SPBU di Kota Malang berjumlah 27 unit yang tersebar di 22 Desa/Kelurahan, adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1 Daftar SPBU di Kota Malang Tahun 2016

No	Desa	Kecamatan	Jumlah
1.	Balearjosari	Blimbing	2
2.	Arjosari	Blimbing	1
3.	Kesatrian	Blimbing	3
4.	Polowijen	Blimbing	1
5.	Purwantoro	Blimbing	1
6.	Bareng	Klojen	1
7.	Kauman	Klojen	1
8.	Kasin	Klojen	1
9.	Kidul Dalem	Klojen	1
10.	Penanggungan	Klojen	1
11.	Arjowinangun	Kedung Kandang	2
12.	Lesanpuro	Kedung Kandang	1
13.	Gadang	Kedung Kandang	1
14.	Sawojajar	Kedung Kandang	1
15.	Tlogowaru	Kedung Kandang	1
16.	Tlogomas	Lowokwaru	2
17.	Mojolangu	Lowokwaru	1
18.	Summersari	Lowokwaru	1

19.	Ciptomulyo	Sukun	1
20.	Sukun	Sukun	1
21.	Karang Besuki	Sukun	1
22.	Kebonsari	Sukun	1
	Total		27

Sumber: Data Sekunder, Daftar SPBU di kota Malang tahun 2016, diolah, 2018

Seperti kecamatan lainnya di kota Malang, kecamatan Lowokwaru memiliki beberapa SPBU yang beroperasi secara aktif 24 jam. Jumlah SPBU di kecamatan Lowokwaru berjumlah 4 stasiun, persebarannya adalah sebagai berikut; 2 (dua) SPBU di desa Tlogomas, 1 (satu) di kelurahan Mojolangu, dan 1 (satu) kelurahan Sumbersari.

Tabel 4.2 Daftar Jumlah Pekerja SPBU di Kecamatan Lowokwaru

Keterangan	Jumlah Total Pekerja	Jumlah Operator Mesin Pompa	Pendidikan Minimal Pekerja	Umur Pekerja
SPBU Tlogomas I	40	32	SMA/ Sederajat	19 – 40 tahun
SPBU Tlogomas II	43	20	SMP – SMA/ Sederajat	19 – 40 tahun
SPBU Mojolangu	40	23	SMP – SMA/ Sederajat	19 – 40 tahun
SPBU Sumbersari	58	38	SMA/ Sederajat	19 – 40 tahun

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa umumnya pekerja yang ditempatkan di bagian operator mesin pompa SPBU tersebut memperkerjakan tenaga kerja dengan rata-rata usia 19 (sembilan belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.⁴⁴ Keempatnya beroperasi 24 jam. *Shift* jam kerja dibagi atas 3 yakni; *pertama*, pukul 06.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB,

⁴⁴Hasil wawancara pra-survey yang penulis lakukan di SPBU Tlogomas pada 12 Februari 2018 pukul 15.12 WIB.

kedua, pukul 14.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, *ketiga* pukul 22.00 WIB sampai dengan 06.30 WIB⁴⁵.

Di negara berkembang seperti Indonesia, SPBU dijaga oleh pekerja SPBU yang disebut sebagai operator. Operator tersebut mengisi bahan bakar kepada konsumen, konsumen membayar biaya pengisian kepada operator. Berbeda dengan negara Eropa ataupun Amerika Serikat, pompa bensin tidak dioperasikan oleh operator SPBU, pelanggan mengisi sendiri bahan bakar sesuai kebutuhan dan membayarnya kepada petugas konter yang tersedia. Pelaksanaan operasional SPBU di Kota Malang sepenuhnya ditetapkan sesuai SOP PT. Pertamina. Untuk perekrutan pekerja adalah tanggung jawab pengelola SPBU, dengan ketentuan seluruh pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan etika kerja standar PT. Pertamina.

Kepemilikan SPBU yang beroperasi di Kota Malang meliputi PT. Pertamina, swasta Nasional (misalnya AKR). Penulis tidak menjumpai SPBU milik swasta asing di Kota Malang. SPBU PT. Pertamina digolongkan dalam tiga jenis, yakni;⁴⁶

a. SPBU COCO (Corporate Owned Corporate Operated)

SPBU yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh PT. Pertamina (Pertamina Ritel).

b. SPBU CODO (Corporate Owned Dealer Operated)

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Diolah dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan *supervisor SPBU* bernama bapak Teguh dan mencocokkan hasil wawancara dengan website resmi SPBU PT Pertamina <http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html> diakses pada 7 September 2018 pukul 17.53 WIB.

SPBU yang operasionalnya merupakan kerjasama antar PT. Pertamina dengan swasta dalam hal ini kepemilikan lahan ataupun lainnya. Artinya, dimiliki dan dikelola PT. Pertamina dan swasta.

c. SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated)

SPBU yang sepenuhnya dimiliki swasta tapi membeli lisensi merk PT. Pertamina (Waralaba). Artinya, dikelola dan dimiliki oleh swasta.

Selain SPBU sebagai tempat pengisian bahan bakar kendaraan, sudah menjadi rahasia umum bahwa SPBU juga salah satu pilihan masyarakat untuk menjadi lokasi *meeting point* sebelum bepergian jauh. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang dimiliki SPBU semakin beragam, umumnya, SPBU di Indonesia menjual beberapa jenis produk dan bahan bakar antara lain; pertamax, pertamax dex, solar, bio solar, pertalite, dan premium. Fasilitas tambahan lainnya adalah dilengkapi dengan *rest area*, toilet, musholah, *mini market*, penambah angin nitrogen, *counter turbo* pulsa dan paket data, *service* oli kendaraan, ATM, serta toko oleh-oleh khas daerah tertentu.

SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menjual beberapa jenis produk dan bahan bakar antara lain; Pertamina, Pertamina Dex, Pertamina Turbo, Solar, Bio Solar, Pertalite, dan Premium. Namun khusus untuk premium, banyak SPBU yang sudah tidak menyediakan jenis bahan bakar tersebut, banyak SPBU telah mengalihkannya ke produk pertalite. Meskipun premium sebagai salah satu produk bersubsidi dan cukup diminati konsumen, tetapi sudah sangat jarang dapat dijumpai di Kota Malang. Menghilangnya premium pada sebagian besar SPBU di Kota

Malang tidak mengurangi pendapatan yang diterima sebagian besar SPBU di Kota Malang.⁴⁷

Produk yang ditawarkan tiap SPBU pun beragam. SPBU di Kota Malang mayoritas sudah menyediakan jasa oli/pelumas, gas elpiji, dan gas nitrogen. Kondisi SPBU di Kota Malang beraneka ragam, mulai dari dilengkapi dengan layanan ATM, sampai dengan mini market dan toko jajanan oleh-oleh khas Malang. Pengusaha maupun pengurus SPBU semakin aktif memberikan layanan-layanan tambahan guna meningkatkan minat konsumen dan sebagai strategi untuk bersaing dengan sesama pemilik SPBU di Kota Malang.⁴⁸

Selain pemberian layanan tambahan yang semakin lengkap, kini tiap sudut SPBU di Kota Malang sudah merata menerapkan sarana dan prasarana pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam mengendalikan resiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut berbentuk rambu tanda peringatan dan lambang-lambang berbahaya, sarana perangkat pemadam kebakaran, sarana instalasi pengolahan limbah, instalasi sumur pantai, dan lampu penerangan yang menerangi seluruh area SPBU, fasilitas umum seperti; musholah, toilet, lahan parkir.⁴⁹ Rambu-rambu dan tanda peringatan tersebut berupa dilarang memotret, dilarang menyalakan

⁴⁷ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 7-10 September 2018.

⁴⁸ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 7-10 September 2018.

⁴⁹ ibid

telepon genggam, jagalah kebersihan, dilarang merokok diarea SPBU, tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran, serta petunjuk jalur evakuasi bila sewaktu-waktu ada kebakaran.⁵⁰

B. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kota Malang.

PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang menerapkan SMK3 secara terintegrasi melalui departemen khusus yang fokus kepada implementasi SMK3, yaitu Departemen HSE (*Health, Safety, Environment*). Istilah HSE tersebut menggantikan istilah K3LL (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan) yang sebelumnya. Sebagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, penerapan SMK3 yang diterapkan oleh PT. Pertamina memperhatikan Lindung Lingkungan, yang dikenal dengan SMK3L melalui sistem manajemen HSE secara konsisten dan mencakup seluruh dimensi SMK3L.

Penerapan SMK3L yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina tersebut dilaksanakan dan berlaku hingga ke anak perusahaannya, termasuk oleh PT. Pertamina Retail yang bergerak di sektor perdagangan dan pengangkutan Bahan Bakar Kendaraan selanjutnya disebut BBM. PT. Pertamina Retail beserta manajemen terkait pengoperasian SPBU sangat memperhatikan aspek K3 dalam bekerja dan beraktivitas ditempat kerja.

⁵⁰ ibid

Berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan serta keahlian para pekerjanya.

Health, PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam mengelola SPBU menjamin untuk setiap para pekerjanya agar mendapatkan tempat bekerja yang sehat dengan didukung gaya hidup yang sehat agar menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi para pekerja guna mencegah penyakit akibat kerja. *Safety*, PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam mengelola SPBU untuk memperhatikan aspek K3 dalam bekerja dan beraktivitas sebagai prioritas utama disamping mengejar tujuan perusahaan dalam hal produksi agar terciptanya suasana kerja yang kondusif dan menghilangkan resiko kecelakaan kerja sehingga angka kecelakaan menjadi nihil. *Environtmen*, PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam mengelola SPBU menjadikan lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar sebagai salah satu prioritas penting meskipun SPBU melakukan proses distribusi dan penyimpanan bahan bakar, PT. Pertamina Retail tetap memperhatikan aspek yang ramah lingkungan, tanpa pencemaran, maupun limbah beracun agar lingkungan tersebut terhindar dari pencemaran lingkungan, tumpahan minyak, dan berkomitmen dalam pemakaian energi.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut sebagai SMK3 di Indonesia berguna untuk mengurangi dan meminimalisir masalah angka kecelakaan kerja, bagi perusahaan yang berdiri di Indonesia, kewajiban menerapkan SMK3 adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku. Setiap

perusahaan memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda menyesuaikan kondisi kerja dan lapangan perusahaan tersebut.

Setiap pengusaha SPBU harus memahami standar dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti; memastikan setiap pekerja SPBU terlatih dan memahami prosedur kerja yang baik, memastikan pemberian alat pelindung diri yang mendukung perkajaan para pekerja, memastikan seluruh tanda-tanda peringatan dan rambu-rambu yang diperlukan di lingkungan SPBU dalam keadaan baik dan dapat terlihat dengan jelas, menyediakan dan memastikan bahwa seluruh peralatan pemadam kebakaran siap pakai, bertanggungjawab bilamana terjadi kecelakaan kerja, memastikan seluruh kerusakan yang terjadi telah dilaporkan.⁵¹ Pekerja SPBU juga mempunyai tanggung jawab seperti; memperhatikan dan mematuhi segala peraturan dan kebijakan PT. Pertamina mengenai SMK3 sesuai instruksi, melaporkan kejadian dan potensi bahaya terhadap kerusakan peralatan pada SPBU kepada pengusaha SPBU.⁵²

Sesuai dengan pengertian SMK3 menurut pasal 1 Peraturan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan guna mengendailkan risiko

⁵¹ Hasil wawancara penulis dengan kepala (pengurus SPBU Summersari) mengenai Standar operasional dan pelayanan SPBU milik Pertamina. Dilakukan pada 9 November 2018 pukul 10.47 WIB

⁵² Ibid

yang berhubungan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 tersebut meliputi;

- a. Penetapan kebijakan terkait K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3.
- c. Menerapkan kebijakan K3 secara efisien dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran.
- d. Mengukur dan memantau serta mengavaluasi kinerja K3 guna meningkatkan tindakan pencegahan dan perbaikan.
- e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkala dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.

Penerapan SMK3 bagi sektor industri minyak bumi dan gas oleh PT. Pertamina Retail berkomitmen dalam mengelola SPBU bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan jam kerja yang telah hilang akibat kecelakaan kerja serta menghindari kerugian perusahaan.
- b. Menciptakan tempat kerja yang aman, harmonis antar pekerja, produktif karena para pekerja merasa memiliki lingkungan yang aman dalam bekerja.
- c. Meningkatkan nilai jual terhadap perusahaan yang juga bersaing di sektor yang serupa.

- d. Memberikan kemampuan pekerja untuk mengaplikasikan peralatan kerja maupun peralatan yang mendukung keamanan saat bekerja demi terciptanya pekerja yang berkompetensi.

1. Penetapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

SPBU kecamatan Lowokwaru kota Malang

a. Visi dan Misi

Visi dan misi yang dimiliki keempat SPBU Pertamina yang berada di Kecamatan Lowokwaru menganut visi dan misi milik perusahaan pusat, yaitu PT. Pertamina. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut;

Visi

“Menjadi perusahaan energi kelas dunia⁵³”

Misi

“Menjalankan usaha minyak, gas, serta energy baru dan terbarukan secara integrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat⁵⁴”

b. Struktur Organisasi

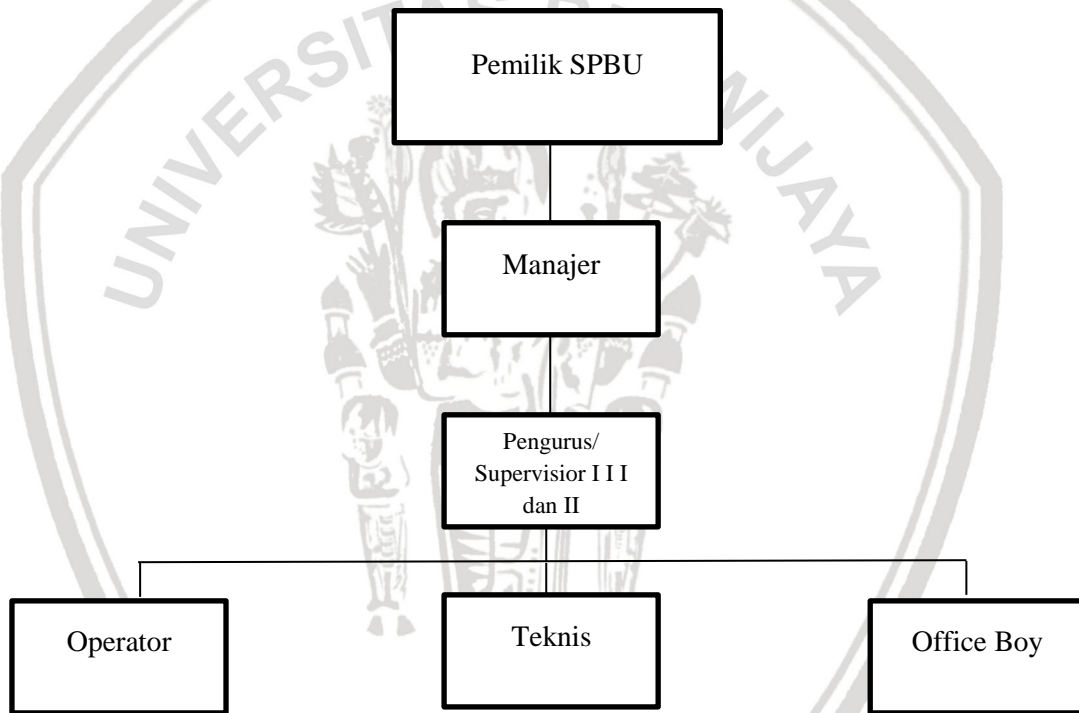
Seperti perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan baik produksi dan penjualan barang atau jasa pada umumnya, SPBU juga memiliki struktur organisasi yang terbentuk untuk menunjang keberlangsungan usaha atau bisnis guna tercapainya tujuan perusahaan. Dari hasil yang diperoleh oleh penulis adalah,

⁵³ Dikutip dari website resmi milik PT. Pertamina <https://www.pertamina.com/id/visi-misi-tujuan-dan-tata-nilai> Diakses pada 13 September 2018 pukul 12.04 WIB

⁵⁴ ibid

rata-rata stuktur organisasi yang dimiliki SPBU satu dan lainnya adalah cenderung sama.

Stuktur organisasi yang dibentuk tersebut, bertujuan untuk terciptanya kepengurusan dengan susunan yang terakomodir, juga untuk mengetahui tingkatan dan tugas serta wewenang tiap bagian, demi kepuasan hati konsumen dan terciptanya ketertiban perusahaan. Berikut adalah rangkuman gambaran umum stuktur organiasi SPBU di Kota Malang⁵⁵;



Sumber: Data Sekunder, diolah dari hasil wawancara dengan Supervisor SPBU 54 65105

Tlogomas, kota Malang, 2018

⁵⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 7-10 September 2018.

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi pada SPBU adalah sebagai berikut;

a) Pemilik SPBU

Pemilik SPBU adalah pemimpin serta menjalankan perusahaan, bertugas untuk ikutserta rapat dan memberikan laporan-laporan SPBU kepada PT. Pertamina, memberikan perintah serta arahan pada pengurus dan membantu kinerja pengurus dan supervisor. Pengurus bertugas membuat laporan untuk pemilik SPBU dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), ikutserta rapat dengan pengurus SPBU lain, ikut serta audit Pertamina, merekrut dan mengeluarkan pekerja, serta mengawasi manajer dan supervisor.

b) Manajer SPBU

Manajer SPBU merupakan yang bertugas mewakili SPBU dihadapan Pertamina, menetapkan keputusan internal SPBU, melakukan proses pengadaan BBM, melaksanakan manajemen personalia SPBU.

c) Pengurus/ *Supervisor* SPBU

Selanjutnya, *supervisor* bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU, bertugas mengawasi dan memotivasi para pekerja, mengecek kualitas BBM dan tangki pendam BBM, memperbaiki alat-alat penunjang SPBU seperti alat pemadam kebakaran, pompa dispenser.

d) Operator SPBU

Operator SPBU bertugas melayani konsumen dalam pengisian BBM, menjalankan SOP dengan baik, memahami serta merawat produk,

fasilitas dan sarana yang ada di SPBU, menjaga kebersihan pulau pompa, serta menerima pengaduan konsumen dengan baik.

e) Teknis Pengawas/ Foreman

Teknis pengawas adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional penjualan BBM, mengoordinasikan kegiatan *shift*, menyelesaikan kegiatan administrasi umum, dan membuat transaksi keuangan.

f) Petugas kebersihan

Terakhir, Petugas kebersihan bertugas membersihkan dan membenahi area SPBU, merawat fasilitas dan sarana yang ada di SPBU.⁵⁶

b. Komitmen dan Tekad Melaksanakan Kegiatan

Dalam beberapa tahun kedepan SPBU Pertamina berkomitmen untuk mencapai sasaran strategis berupa⁵⁷;

1. Menjadi produsen minyak dan gas, dan penyedia produk minyak dan gas terbesar di Indonesia.
2. Memiliki unit-unit pengolahan minyak yang handal, efisiensi dan memiliki daya saing tinggi dengan perusahaan serupa.
3. Merupakan pemasok bahan bakar, bahan baku, dan produknya dan gas yang handal, menjadi pemimpin pasar dan memiliki jaringan infrastruktur berdaya saing tinggi.
4. Menjadi perusahaan nasional yang menghasilkan keuntungan terbesar, yang mampu membiayai investasi dan memberikan kontribusi signifikan kepada keuangan negara.

⁵⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 7-10 September 2018.

⁵⁷ ibid

Untuk menjaga komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan guna pendukung penerapan SMK3, maka tiap SPBU yang dikelola oleh PT. Pertamina menetapkan komitmen dan tekad yang digunakan sebagai pedoman seluruh jajaran perusahaan adalah sebagai berikut⁵⁸;

1. Bersikap dan bertindak jujur

Berinteraksi dan bertindak jujur dengan sesama pekerja maupun dengan pihak eksternal serta selalu bertindak berdasarkan niat baik.

2. Dapat dipercaya

Tidak menyalahgunakan wewenang, informasi dan rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau kegiatan politik.

3. Menghindari konflik kepentingan

Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.

4. Tidak mentolerir suap

Tidak menerima suap dalam kegiatan yang bersifat kegiatan perusahaan.

c. Program Kerja Umum

SPBU yang dikelola oleh PT. Pertamina memiliki beberapa program kerja yang sifatnya menahun guna berusaha mengutamakan konsumen, yakni;

⁵⁸ ibid

1. Program Sertifikasi PASTI PAS!

Program tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan pengisian BBM dengan cepat, aman, nyaman dan PAS. Sertifikasi tersebut ditandai dengan logo PASTI PAS! Di area SPBU yang memenuhi kualifikasi.

2. Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

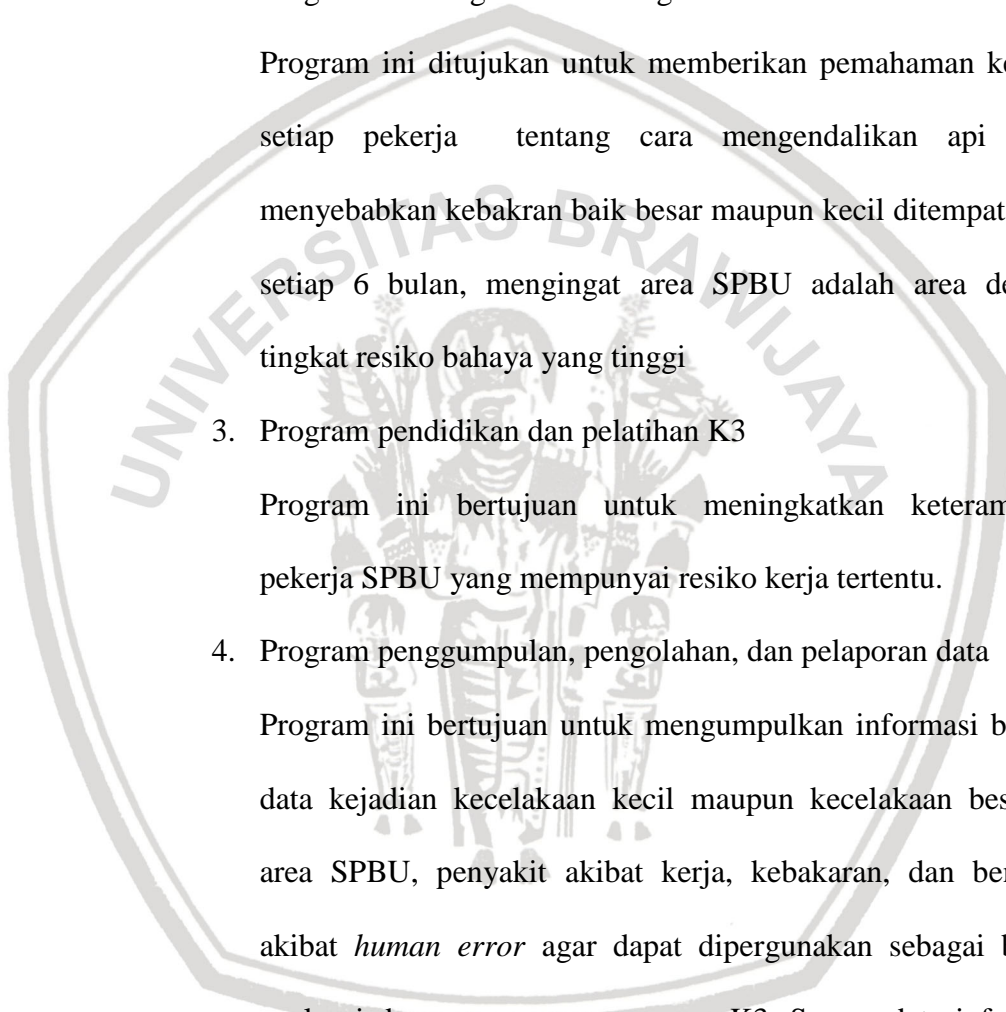
Program ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada setiap pekerja tentang cara mengendalikan api yang menyebabkan kebakaran baik besar maupun kecil ditempat kerja setiap 6 bulan, mengingat area SPBU adalah area dengan tingkat resiko bahaya yang tinggi

3. Program pendidikan dan pelatihan K3

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja SPBU yang mempunyai resiko kerja tertentu.

4. Program pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data

Program ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berupa data kejadian kecelakaan kecil maupun kecelakaan besar di area SPBU, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan bencana akibat *human error* agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program K3. Semua data informasi tersebut dicatat pada form yang telah ditentukan dan dilaporkan kepada departemen HSE di PT. Pertamina guna sebagai bahan evaluasi kinerja.



5. Program *Reward* untuk Pekerja

Nama dan program penghargaan ini tidak merata sama pada tiap SPBU, tergantung yang membuat kebijakan, program ini ditujukan untuk pekerja yang dinilai memiliki kinerja yang baik dari pekerja lainnya baik dalam bentuk poin maupun kriteria dalam penilaian, diberikan dalam bentuk peanugrahan gelar berupa surat/ sertifikat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berkompetisi para pekerja agar menjadi lebih baik lagi guna pencapaian target produktivitas perusahaan.

Kejelasan struktur, visi dan misi, komitmen perusahaan serta program kerja pada penjelasan diatas sebagai pengelola SPBU, PT. Pertamina Retail tersebut menggambarkan bahwa perusahaannya telah memenuhi ketentuan perihal kebijakan nasional penerapan SMK3.

2. **Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Area SPBU merupakan area dengan tingkat resiko bahaya tinggi sehingga diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, penyakit dan pencemaran. Dalam area SPBU tidak diperkenankan mengadakan kegiatan selain yang berkaitan dengan menyalurkan bahan bakar dan usaha penunjangnya, kecuali dengan izin PT. Pertamina. Area SPBU harus terpelihara dan

selalu terjaga kebersihannya. Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut terdiri dari:

1. Keselamatan Kerja

Saat penerimaan dan pembongkaran bahan bakar, maka yang harus dilakukan adalah; mobil tangki diparkir pada tempat yang telah ditentukan agar tidak mengganggu operasional kegiatan lainnya, pengemudi melapor pada supervisor SPBU, pembongkaran bahan bakar dilengkapi dengan *quick coupling*, menyediakan alat pemadam kebakaran didekat tangki, memasang rambu “AWAS SEDANG ADA BONGKAR BBM”, mesin mobil harus dimatikan, memastikan area tersebut tidak ada aktivitas yang memicu timbulnya panas/ api, menghindari timbulnya tumpahan bahan bakar. Saat pengisian bahan bakar ke kendaraan konsumen, maka yang harus dilakukan adalah; pastikan mesin kendaraan konsumen saat mengisi bahan bakar dimatikan, dilarang mengisi bahan bakar selain dalam tangki kendaraan termasuk jerigen, dilarang merokok dan mengaktifkan telepon genggam saat pengisian bahan bakar.

Selain kedua hal tersebut, kebersihan area SPBU harus selalu terjaga dan bebas dari sampah serta tumpahan minyak, saluran air harus dalam keadaan bersih dan lancar, menempatkan bak sampah yang mencukupi. Dalam hal ini, SPBU yang berada di kecamatan Lowokwaru telah memasang berbagai macam bentuk rambu-rambu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang di SPBU dan

larangan tersebut berlaku bagi pekerja maupun bagi konsumen, namun dalam kenyataannya, masih banyak konsumen yang tidak sadar akan rambu-rambu larangan yang telah dipasang diberbagai sudut area SPBU tersebut.

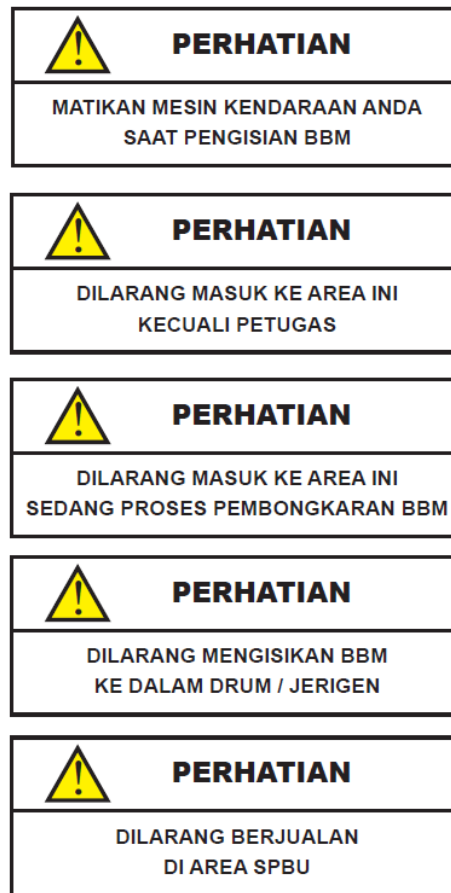
Tanda dan rambu peringatan di SPBU adalah sebagai berikut;

1. Tanda dilarang merokok
2. Petunjuk tata cara pembongkaran BBM
3. Tanda harus mematikan mesin kendaraan saat pengisian BBM
4. Tanda dilarang menyalakan hand phone/telepon genggam
5. Tanda dilarang menggunakan kamera di area SPBU
6. Rambu peringatan sedang dalam proses pembongkaran BBM
7. Tanda dilarang untuk memasuki area tertentu di SPBU
8. Tanda dilarang berjualan di area SPBU
9. Tanda dilarang mengisi BBM ke dalam drum/jerigen
10. Rambu-rambu petunjuk arah lalu lintas di SPBU

Gambar 4.2 Tanda Rambu-Rambu Larangan pada SPBU



Gambar 4.3 Rambu Himbauan pada SPBU



Sumber: Data Sekunder, diolah dari hasil wawancara dengan Supervisor SPBU 54 65105 Tlogomas, kota Malang, 2018

2. Pencegahan Kebakaran

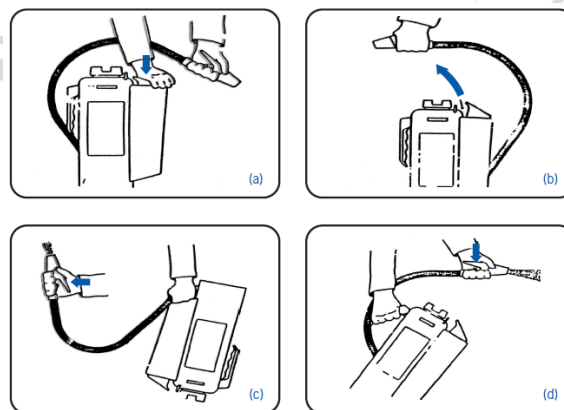
Area SPBU harus aman dari sumber api dengan cara mengatur jarak aman dengan tembok pembatas. Pekerja SPBU juga harus memastikan bahwa tidak terdapat akumulasi uap bahan bakar yang dalam kondisi tertentu dapat terbakar ataupun meledak. Tiap area SPBU harus selalu tersedia alat pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup menurut ketentuan PT. Pertamina dan harus selalu dalam keadaan siap pakai, alat tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan tidak dipindahkan tanpa izin

petugas setempat, alat tersebut juga harus diperiksa setiap 6 bulan oleh petugas berwenang, setiap pekerja SPBU harus memahami dan terlatih menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia di SPBU.

Alat pemadam kebakaran di SPBU berjenis *Dry Chemical Powder* tipe *catridge* dengan kapasitas 9 (sembilan) kg minimal 1 (satu) unit di setiap tiang kenopi, memiliki 2 (dua) racun api beroda tipe *Dry Chemical Powder* kapasitas 70 (tujuh puluh) kg tergantung luas dan sarana di SPBU, alat pemadam jeis CO² untuk ruang listrik. Tanda dan rambu peringatan di SPBU adalah sebagai berikut;

Alat pemadam kebakaran di SPBU berjenis *Dry Chemical Powder* tipe *catridge* dengan kapasitas 9 (sembilan) kg minimal 1 (satu) unit di setiap tiang kenopi, memiliki 2 (dua) racun api beroda tipe *Dry Chemical Powder* kapasitas 70 (tujuh puluh) kg tergantung luas dan sarana di SPBU, alat pemadam jeis CO² untuk ruang listrik.

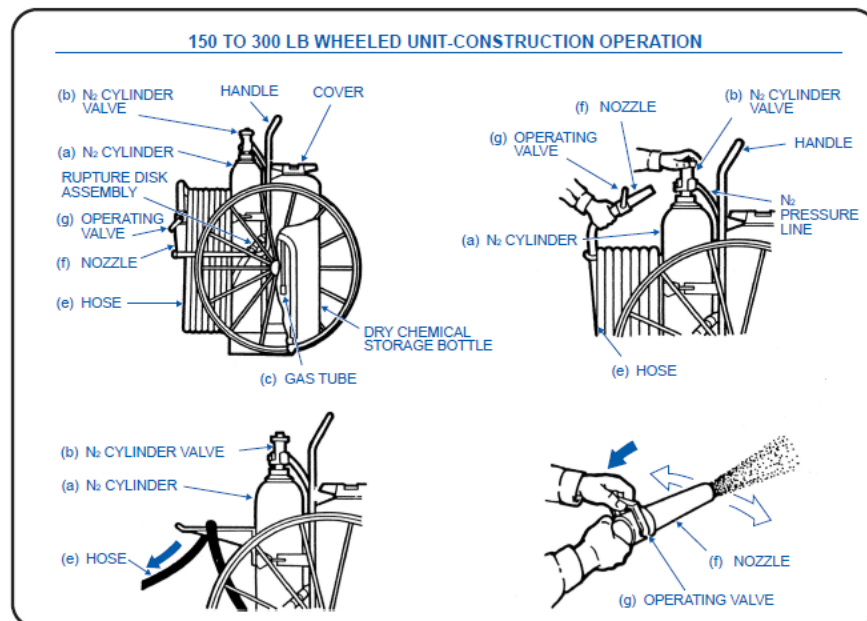
Gambar 4.4 Gambar Tatacara Alat Pemadam Kebakaran di SPBU



Tatacara pengoperasian alat pemadam kapasitas 9 (Sembilan) kg seperti gambar diatas adalah sebagai berikut;

1. Turunkan alat pemadam dari tempatnya, lepaskan selang dari jepitan;
2. Pegang *horn nozzle* dengan tangan kiri dan tangan kanan menekan pemecah catridge dengan posisi badan menyamping dari *fill cap* racun api; (*tertera pada gambar*));
3. Dekati api dari arah angin datang dengan memegang *nozzle* sudut 45^0 , padamkan api dengan mengarahkan semburan serbuk kimia dari depan sudut tepi api. Maju perlahan, dan mengibaskan ke kiri dan ke kanan sehingga semburan serbuk kimia melewati tepian api yang terbakar tertutup dengan sempurna;
4. Perhatikan dengan seksama, jangan membelakangi api karena kemungkinan api menyala kembali dan akan membahayakan pemakai;
5. Bila terjadi kebakaran besar dan api tidak dapat dipadamkan dengan APAR, segera hubungi petugas pemadam kebakaran terdekat.

Gambar 4.5 Gambar Alat Pemadam Kebakaran Kapasitas 150 Lbs



Sumber: Data Sekunder, diolah dari hasil wawancara dengan Supervisor SPBU 54 65105 Tlogomas, kota Malang, 2018

1. Tarik alat pemadam ke lokasi kebakaran sampai jarak aman (kurang lebih 5 meter);
2. Tarik slang dan pegang ujung nozzle;
3. Tarik tekan tuas kunci untuk menusuk seal;
4. Tes alat pemadam dengan membuka nozzle, arahkan ke atas/tempat yang aman, lalu kibas-kibaskan sehingga semburan tepung merata menutup kebakaran;
5. Bila api mati, mundur perlahan, jangan membalik karena api mungkin akan menyala kembali;
6. Bila api tidak mati, mundur menjauh dari api dan minta bantuan.

Dalam hal ini, alat pemadam kebakaran telah dipenuhi oleh setiap SPBU di kecamatan Lowokwaru, dengan beberapa macam berat

yang berbeda berjenis *Dry Chemical Powde*. Setiap SPBU di kecamatan Lowokwaru memiliki lebih dari 3 (tiga) alat tersebut yang siap digunakan dalam waktu tertentu sesuai petunjuk yang telah terpasang didekat alat tersebut. Namun, saat penulis menanyakan kepada beberapa pekerja, menurut pengakuan pekerja tersebut tidak mengerti tatacara penggunaan alat pemadam kebakaran tersebut dengan alasan belum diberi *training* secara baik oleh pengurus, hanya diberikan pengertian bahwa alat tersebut merupakan alat pemadam kebakaran dan wajib membaca tata cara penggunaan sebelum digunakan.

3. Kesehatan Kerja

Setiap pekerja diharuskan menghindari kontak lama dan berulang antara bahan bakar dengan kulit, mengganti atribut diri yang telah terkontaminasi dengan minyak dan cuci tubuh dengan sabun dan air, menghindari menghirup uap bensin berlebihan yang dapat menyebabkan timbulnya resiko penyakit akibat kerja dan resiko kecelakaan kerja.

Dalam hal ini, mengharuskan para pekerja untuk menghindari kontak lama dan berulang antara bahan bakar dengan kulit, dalam SOP tidak ada ketentuan mengenai perlindungan tentang kesehatan kerja, khususnya mengenai pendukung agar terlaksananya ketentuan mengenai kesehatan kerja tersebut.

4. Perlengkapan APD

Pekerja SPBU harus dilengkapi dengan pelindung tubuh berupa pakaian kerja standard, dan pelindung kaki berupa sepatu keselamatan (*safety shoes*).

Didalam SOP yang diterbitkan oleh PT. Pertamina, para pekerja SPBU hanya diwajibkan menggunakan pakaian kerja standard, dan pelindung kaki berupa sepatu keselamatan (*safety shoes*). Tidak mencantumkan ketentuan mengenai alat pelindung pernafasan, dan tangan sebagai pendukung terpenuhinya ketentuan mengenai kesehatan kerja. Setiap pekerja diperkenankan menggunakan alat pelindung pernafasan dan tangan saat dalam keadaan sakit. Seperti, flu, batuk, tangan mengalami luka guna menghindari bahan bakar kontak kulit secara langsung.

5. Penanggulangan Kebakaran dan Pencemaran

Tiga kebakaran yang dapat terjadi di SPBU, yaitu kebakaran kecil dan kebakaran besar. Bila terjadi kebakaran kecil, pekerja yang mengetahui terlebih dahulu segera memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran *portable* yang terdekat (bukan air), memberitahukan pekerja lainnya dengan berkata “KEBAKARAN” tetap harus diupayakan tidak menimbulkan kepanikan konsumen, bila kebakaran berhasil dipadamkan pekerja membuat laporan kejadian di *safety log book* dan amankan lokasi kejadian guna evaluasi. Bila terjadi kebakaran besar.

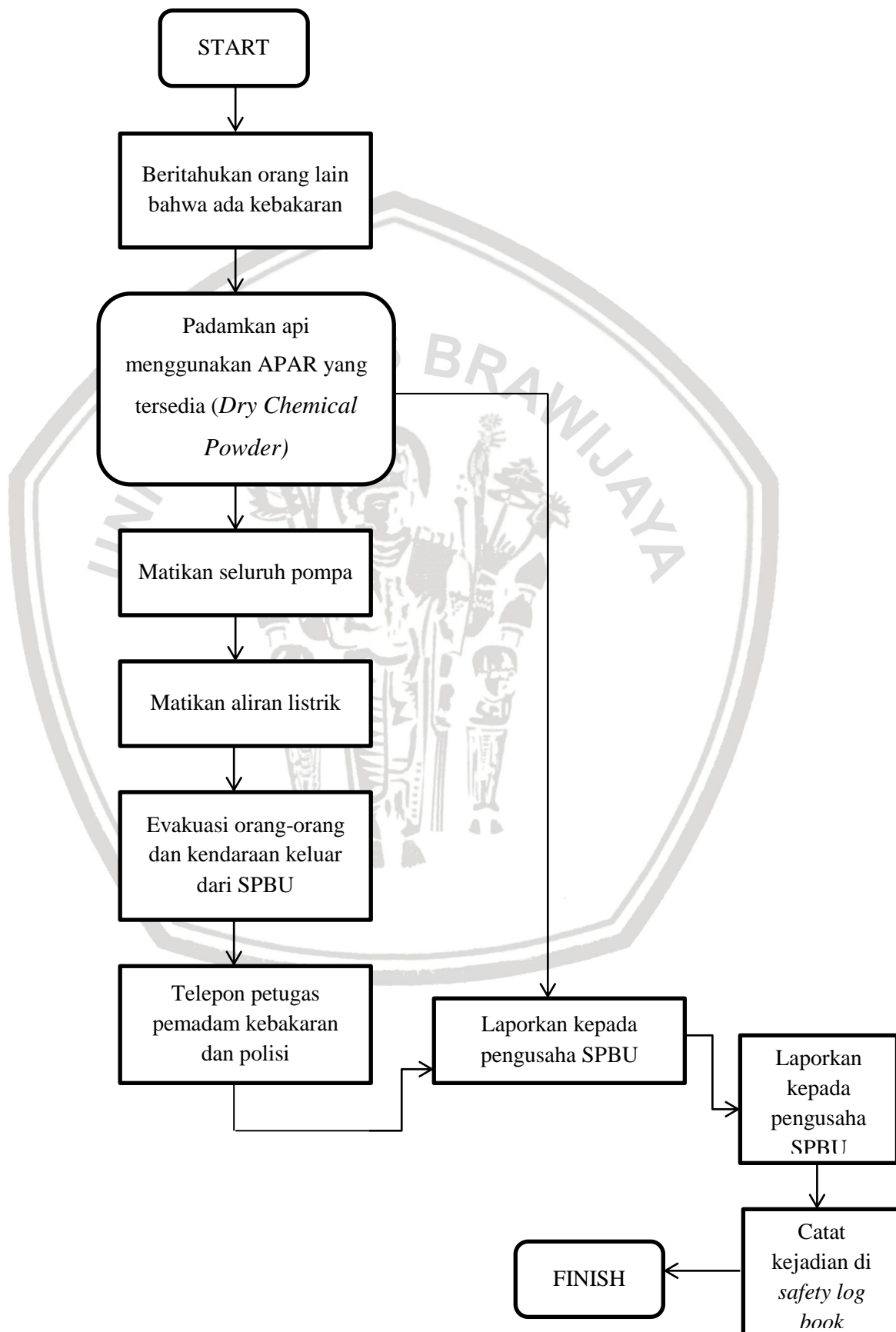
Matikan seluruh aliran listrik dan hentikan seluruh kegiatan di SPBU, bila kebakaran menimpa mobil konsumen segera pindahkan mobil

tersebut tempat yang aman dan jauh dari tangki pendam, bila kebakaran terjadi saat pembongkaran bahan bakar dari mobil ke tangki pendam segera lepas selang bongkar dan hentikan pembongkaran lalu segera evakuasi mobil tangki ke tempat yang aman, atur dan arahkan konsumen bersama kendaraannya keluar dari SPBU.

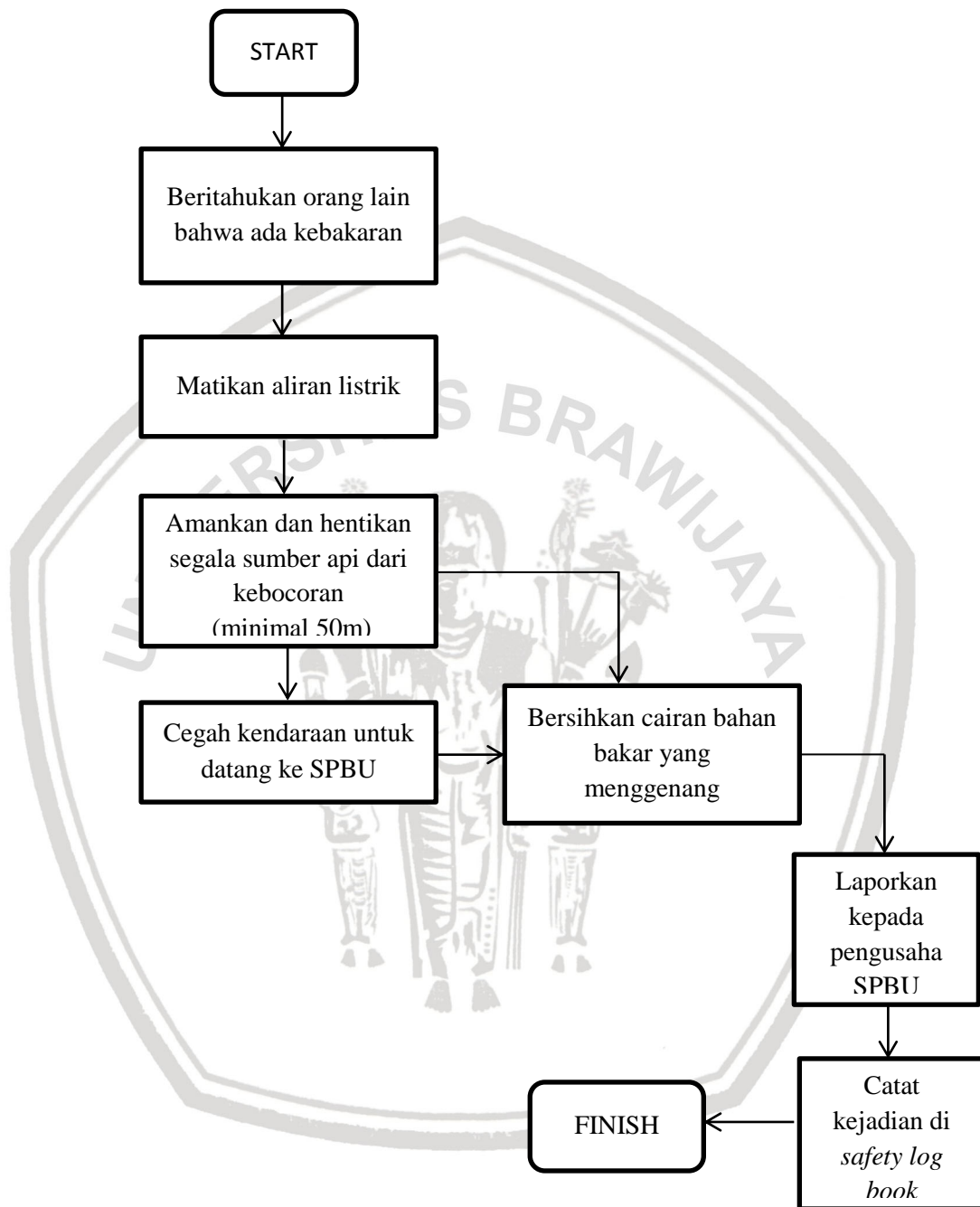
Blokir lokasi SPBU sehingga semua orang tidak berkepentingan tidak masuk area SPBU, telepon petugas pemadam kebakaran dan polisi serta PT. Pertamina terdekat, laporkan pada pemilik atau manajer SPBU, bila kebakaran berhasil dipadamkan pekerja membuat laporan kejadian di *safety log book* dan amankan lokasi kejadian guna evaluasi.



Berikut adalah *flow chart* pemadaman kebakaran/ ledakan;



Berikut *flow chart* kecelakaan fatal:



Sumber: Data Sekunder, diolah dari hasil wawancara dengan Supervisor SPBU Sumbersari kecamatan Lowokwaru, kota Malang, 2018

Bila terjadi kecelakaan fatal, yang dilakukan oleh pekerja SPBU yakni, melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) untuk korban, telepon ambulan dan rumah sakit terdekat, hentikan pengoperasian SPBU bila diperlukan, dan laporkan kejadian tersebut kepada pengusaha SPBU dan PT. Pertamina.

Dalam hal ini, setiap pekerja di SPBU diwajibkan mengetahui ketentuan mengenai penanggulangan kebakaran. Bentuk pemberian ilmu mengenai penanggulangan kebakaran kebarakan tersebut adalah dengan cara *training* dan sesuai SOP simulasi tentang penanggulangan kebakaran dilakukan 6 (enam) bulan sekali. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, para pekerja SPBU dikecamatan Lowokwaru memberikan pernyataan beragam, pada SPBU Tlogomas, pekerja mengatakan bahwa selama 4 (empat) tahun bekerja, sudah mendapatkan 1 (satu) kali *training* dan 1 (satu) kali simulasi penanggulangan kebakaran. Sedangkan pekerja SPBU Sumpalsari mengatakan, bahwa selama 2 (dua) tahun bekerja, telah mendapatkan 1 (satu) kali *training* dan 3 (tiga) kali simulasi penanggulangan kebakaran. Sedangkan pada SPBU Mojolangu, para pekerja hanya mendapatkan *training* berupa penjelasan mengenai penanggulangan kebakaran dan informasi mengenai SMK3 yang diterapkan di SPBU tanpa simulasi.

3. Pemantauan Evaluasi Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemantauan evaluasi kinerja K3 sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini, setiap SPBU diwajibkan untuk membuat laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan kepada pihak PT.Pertamina. Laporan-laporan tersebut berbentuk form. Setiap terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, maupun hal-hal tak terduga yang sifatnya kepentingan bersama, petugas *safety* yang ditunjuk akan melakukan investigasi dalam hal ini adalah tim *HSE Operational Pertamina*. Tim tersebut akan memeriksa segala hal terkait operasional, penyebab, dan kondisi tiap SPBU.

4. Peninjauan Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bimana terjadi perubahan peraturan yang mengatur mengenai SMK3 pada SPBU, yang bersifat pelaporan, hasil kajian, kejadian yang telah terjadi, masukan dari pekerja maupun konsumen, maka hal tersebut menjadi bahan pertimbangan. Selain hal tersebut, perkembangan yang terus meningkat akibat tuntutan pasar dan ketentuan pendukung yang sebelumnya belum menjadi aturan tertulis, maka dilakukan rapat produksi dan rapat pemeliharaan yang dilakukan oleh perwakilan PT. Pertamina, pengawas, dan pengurus SPBU guna peningkatan SMK3 pada SPBU khususnya SPBU di kecamatan Lowokwaru. Misalnya, bila terjadi kecelakaan kerja, maka seluruh pihak terkait melakukan investigasi guna menelusuri penyebab serta cara mengatasi kecelakaan tersebut dan melakukan rapat guna perbaikan peningkatan kinerja kedepannya.

C. Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Malang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis telah melakukan pengamatan secara langsung situasi di lapangan dan wawancara dengan banyak narasumber SPBU di kecamatan Lowokwaru. Bentuk wawancara yang penulis lakukan adalah tanya jawab yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan, tetapi sesekali penulis melakukan improvisasi. Penulis menemukan beberapa hal yang menyebabkan penerapan terhadap SMK3 di SPBU berjalan dengan tidak optimal, karena berjalan tidaknya suatu aturan yang berlandaskan hukum disebabkan oleh beberapa faktor.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa; "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁵⁹ Sebagaimana tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak terkait agar dapat tercapainya secara keseluruhan, maka dari itu peraturan tersebut harus dibuat secara cermat, jelas dan mudah dimengerti agar tidak menyebabkan penafsiran yang berbeda. Karena penggunaan dan penerapan akan hukum tidak

⁵⁹Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm 7

dengan cara yang sama di setiap tempat maka perumusan aturan hukum yang cermat, jelas dan mudah dimengerti dapat memudahkan dalam mencapai tujuan dan pembentukan hukum tersebut didalam pelaksanaannya⁶⁰ Ilmu tentang efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan ilmu yang menerangkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁶¹ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya suatu peraturan/norma hukum atas penegakan hukum tersebut tergantung pada tiga hal, yaitu; substansi hukumnya (materi hukum), struktur hukumnya (tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan) dan budaya hukumnya (*legal culture*)⁶²

1. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud adalah produk hukum materiil yang pelaksanaannya diwajibkan dan berlaku bagi seluruh aspek yang mencakupnya. Maksudnya adalah menjelaskan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung pada aturan hukum tersebut. Maksudnya adalah menentukan dapat berfungsinya

⁶⁰Seorjono Seokanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 11

⁶¹ Soleman B Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm 47-48.

⁶² Lawrence M. Friedman, *America Law: An Introduction* (New York:W.W Norton and Company, 1984). Lawrence M. Friedman, *A History of America Law* (New York: Simon and Schuster) 1973.

hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian sebuah manfaat atas sasaran dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Achmad Ali berpendapat dalam bukunya bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat menjadi barometer ukuran, apakah aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”⁶³

Salah satu produk hukum yang mengatur tentang K3 adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada aturan tersebut mengulas banyak mengenai K3, mulai dari kewajiban pimpinan tempat dimana pekerja bekerja untuk memfasilitasi K3, hingga perencanaan dan pelaksanaan K3. Kedua aturan tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 100 (seratus) orang dan berpotensi terhadap resiko bahaya.

Aturan mengenai bidang K3 dan penerapan SMK3 telah diberlakukan dan dijalankan oleh tiap SPBU, aturan tersebut pun sudah terbentuk secara sistematis dan mengatur banyak ketentuan mengenai K3. Namun, secara kuantitatif dan kualitatif, aturan mengenai K3 sudah tergolong lama dan memerlukan pembaruan, dimana perkembangan zaman mengalami banyak perubahan yang membutuhkan aturan hukum guna berjalannya aturan dengan baik.

⁶³Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1**, Jakarta; Kencana 2010, hlm 375

Misalnya, dalam SOP di SPBU yang dikelola langsung PT. Pertamina yang mengatur mengenai K3 pada pekerja SPBU di kecamatan Lowokwaru, ketentuan mengenai APD yang diwajibkan adalah hanya alat pelindung tubuh berupa baju standard dan sepatu *safety*. APD berupa alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan tidak dimasukan dalam SOP di SPBU dengan pertimbangan akan menghambat prinsip dalam meyalani konsumen, yakni Senyum, Sapa dan Salam. Dari segi ilmu kesehatan, Menurut dokter spesialis penyakit dalam dr. Bukit P Siahaan, Sp PD, menjelaskan bahwa uraian uap bensin dapat terhirup melalui hidung, melalui kontak kulit, serta makanan dan minuman yang diletak dengan jarak cukup dekat dengan mesin pompa bensin.⁶⁴ Uap yang dihasilkan bahan bakar atau bensin menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Umumnya, masalah kesehatan jangka pendek adalah sering sakit kepala, mual dan sering batuk kering.⁶⁵

Jangka panjang yang diakibatkan dari seringnya tubuh terpapar uap paparan bensin secara langsung adalah kelainan saraf berbentuk gagalnya tubuh menyampaikan maksud ke otak sehingga otak tidak mampu memproses kerja tiap bagian ditubuh, jika dibiarkan terus menerus maka menyebabkan kematian mendadak.⁶⁶ Namun, penyakit yang diakibatkan uap bensin tersebut sulit terdeteksi secara kasat mata dan jarang disadari jika tanpa pengecekan lanjutan seperti tes urine maupun CT Scan, karena

⁶⁴ Diolah dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu dokter spesialis penyakit dalam dr. Bukit P Siahaan, Sp PD yang berkedudukan di RS Santha Maria Pekanbaru pada Juli 2018 pukul 12.16 WIB

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

banyak orang mengabaikan gejala-gejala masalah kesehatan yang ditimbulkan uap bensin.

Umumnya, uap bensin mengandung zat kimia mudah terbakar dan mudah meledak, zat kimia tersebut campuran berupa benzene, toluene, xylene, pentane dll. Oleh sebab itu, APD berupa masker, sarung tangan, dan sepatu *safety* sangat diperlukan.⁶⁷ Mengenai sepatu *safety* yang dimaksud diatas, dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa pengurus wajib memberikan alat pelindung diri secara cuma-cuma sesuai dengan kebutuhan ditempat kerja, namun seorang pekerja yang namanya ingin disamarkan, X mengatakan bahwa untuk mendapatkan sepatu *safety* X harus membayar setengah harga sepatu tersebut dengan *system* potong gaji.⁶⁸

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. Karena, selain mengacu pada Undang-undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, ada SOP perusahaan yang memberikan aturan terperinci mengenai K3. Namun, aturan hukum tersebut tidak memiliki sanksi administratif, pidana maupun perdata bila aturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak diberlakukan di sebuah perusahaan sehingga banyak perusahaan hanya membuat ketentuan para pekerja melalui SOP dengan tidak melakukan kajian ataupun mempertimbangkan dengan lebih jauh. Pada

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 19-21 September 2018

elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Seluruh aspek yang mencakup penerapan SMK3 yang meliputi Aturan mengenai bidang K3 dan penerapan SMK3 mulai dari perencanaan terhadap kinerja K3 mengenai Keselamatan Kerja, pencegahan kebakaran, Kesehatan Kerja, perlengkapan APD, Penganggulangan Kebakaran dan Pencemaran seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, disimpulkan bahwa struktur hukum yang mempengaruhi penerapan SMK3 pada SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah dilaksanakan dan berlaku.

Regulasi mengenai SMK3 tersebut pun sudah dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan substansi hukum sudah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya rambu-rambu larangan dan himbauan yang terpasang dengan sangat jelas dan rapi di tiap area mesin pompa seluruh SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alat pemadam kebakaran yang tersedia dan berfungsi serta memiliki panduan tatacara pemakaian dengan baik di tiap SPBU. Selanjutnya, dilihat dari APD yang dikenakan setiap pekerja sudah hampir seragam namun hanya berbeda di jenis sepatu para pekerjanya saja. Namun, untuk penganggulangan kebakaran, dari sisi ilmu pengetahuan dan terapan, hal tersebut belum berjalan dengan maksimal dengan berbagai macam kendala dan kondisi yang terjadi pada tiap SPBU.

2. Struktur Hukum

Menentukan bahwa efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan tersebut diharuskan

adanya aparat hukum yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Mencakup keterampilan professional dan memiliki mental yang baik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa, bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik karena adanya lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang sebagai penegak hukum.

Norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak adanya pihak yang berperan dalam hal pengawasan dan dalam upaya menegakkan aturan hukum tersebut.

Pihak yang berwenang mengawasi SMK3 sebuah perusahaan adalah pegawai pengawas bidang K3 yang secara khusus di miliki Dinas Tenaga Kerja selanjutnya disebut disnaker Provinsi Jawa Timur bidang Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang berkedudukan di Surabaya. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja kota Malang memiliki bidang Pengawasan terhadap K3 namun karena beberapa kebijakan pusat, Pengawasan K3 Dinas Tenaga Kerja kota Malang dipindahkan secara serentak sama halnya dengan tiap kotamadya di Jawa Timur ke provinsi.⁶⁹. beliau menjelaskan bahwa pengalihan bidang pegawai pengawas ketenagakerjaan, misalnya ketika memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasus-kasus kecelakaan dan keselamatan kerja (K3), atau laporan

⁶⁹ Diolah dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Malang pada saat penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata tahun 2017.

perusahaan. Sedangkan, fungsi-fungsi seperti wajib lapor ketenagakerjaan, izin perusahaan, perpanjangan IMTA (Izin Masuk Tenaga Kerja Asing) masih di kabupaten/kota. Masih seperti biasa, terkecuali pengawas ketenagakerjaan yang dialihkan ke provinsi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka aparat pengawas internal pemerintahan semua fungsi pengawasan tenaga kerja yang ada di setiap Kabupaten/Kota maka kewenangan tersebut akan berpindah ke Provinsi, pindahnya kewenangan pengawasan tenaga kerja dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi menyebabkan beberapa perubahan dinamika dalam hubungan industrial, salah satunya adalah semakin sulitnya para pekerja terkontrol dengan baik karena minimnya pengawasan. Hal ini pun sejalan dengan pasal 76 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yaitu “Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah”.

Beragam problematika mengenai perpindahan tugas pengawasan tersebut, secara khusus PT. Pertamina memiliki petugas *safety* yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dalam hal ini adalah tim *HSE Operational Pertamina*. Tim tersebut akan memeriksa segala hal terkait operasional, penyebab, dan kondisi tiap SPBU. Namun, kondisi yang terjadi dilapangan, petugas infeksi HSE tersebut tidak rutin melakukan pengawasan setiap hari terhadap aktivitas-aktivitas pengendali mutu bahan bakar, kualitas pekerja, maupun pelaksanaan K3, mengakibatkan

aturan-aturan mengenai prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan tidak disiplin. *Safety Induction* dan *Safety Talk*.⁷⁰ yang merupakan program wajib petugas *safety* menjadi tidak berjalan secara optimal. *Safety Induction* adalah penyuluhan atau sosialisasi tentang keselamatan yang wajib diberikan oleh pihak *HSE* terhadap konsumen, pekerja, atau mitra kerja yang akan melakukan kegiatan di area PT. Pertamina (Persero).⁷¹ *Safety Talk* adalah pembicaraan mengenai keselamatan yang rutin dilakukan oleh pekerja *HSE* untuk mengecek kelengkapan dan memastikan pekerja dalam kondisi sehat dan aman sebelum melakukan pekerjaan. Berguna untuk meningkatkan kesadaran pekerja agar senantiasa menggunakan APD secara berkala dan konsisten. Contohnya adalah, mengingatkan pekerja sebelum melakukan pekerjaannya agar senantiasa menggunakan APD berupa *safety shoes*, *rubber boots*, dan *chemical suit*.⁷² Tujuannya adalah agar semua pihak yang ada di lingkungan SPBU memahami upaya-upaya ini yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dirinya maupun orang lain dan tidak mengandalkan pekerja dari *HSE* dalam hal ini, *HSE* dimaksud adalah tenaga ahli pengawas K3 yang tunjuk PT. Pertamina untuk mengawasi tiap SPBU.⁷³

Seluruh aspek yang mencakup penerapan SMK3 yang meliputi Aturan mengenai bidang K3 dan penerapan SMK3 mulai dari perencanaan terhadap kinerja K3 mengenai Keselamatan Kerja, pencegahan kebakaran, Kesehatan Kerja, perlengkapan APD, Penganggulangan Kebakaran dan Pencemaran seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya,

⁷⁰ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 7-10 September 2018.

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

disimpulkan bahwa struktur hukum yang mempengaruhi penerapan SMK3 pada SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah dilaksanakan dan berlaku. Regulasi mengenai SMK3 tersebut pun sudah dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan substansi hukum berjalan dengan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari adanya rambu-rambu larangan dan himbauan yang terpasang dengan sangat jelas dan rapi di tiap area mesin pompa seluruh SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alat pemadam kebakaran yang tersedia dan berfungsi serta memiliki panduan tatacara pemakaian dengan baik di tiap SPBU. Selanjutnya, dilihat dari APD yang dikenakan setiap pekerja sudah hampir seragam namun hanya berbeda di jenis sepatu para pekerjanya saja. Namun, untuk penganggulangan kebakaran, dari sisi ilmu pengetahuan dan terapan, hal tersebut belum berjalan dengan maksimal dengan berbagai macam kendala dan kondisi yang terjadi pada tiap SPBU.

Dari apa yang terjadi dilapangan, dapat disimpulkan, struktur hukum yang mempengaruhi penerapan SMK3 pada SPBU di Kecamatan Lowokwaru belum berjalan dengan efektif. Dari sisi pemerintahan, pindahnya kewenangan pengawasan tenaga kerja dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi menyebabkan beberapa perubahan dinamika dalam hubungan industrial, salah satunya adalah semakin sulitnya para pekerja terkontrol dengan baik karena minimnya pengawasan. Selanjutnya, dari sisi petugas infeksi HSE yang menangani pemanataan penerapan SMK3 tersebut belum maksimal dalam menjalankan tugas. Dimana masih seringkali didapati para konsumen dan operator

SPBU yang bekerjasama mengisi bensin dengan tabung *derigen* yang jelas-jelas berbahaya dan dilarang. Petugas infeksi K3 tersebut tidak rutin melakukan pengawasan setiap hari terhadap aktivitas-aktivitas pengendali mutu bahan bakar, kualitas pekerja, maupun pelaksanaan K3, mengakibatkan aturan-aturan mengenai prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan tidak disiplin.

3. Kultur Hukum

Hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut berdampak baik dan positif, artinya adalah saat hukum tersebut mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Hukum dapat efektif bila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan sebaiknya. Berbicara mengenai sebuah aturan, daya ukur sebuah aturan hukum ialah mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Ukuran efektif tidaknya suatu produk hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat, apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh produk hukum tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau produk hukum tersebut telah tercapai. Kultur hukum mengacu pada bagian yang ada pada adat kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir.

Untuk faktor mengenai masyarakat dan kebudayaan memiliki kaitan satu sama lainnya, sebab kebudayaan merupakan hal yang dikerjakan dan dilakukan masyarakat. Dalam hal ini, kebiasaan membaca, kebiasaan untuk patuh terhadap aturan sulit diterapkan karena tidak adanya

pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan. Contohnya, merokok di area SPBU bagi sebagian masyarakat adalah hal yang sederhana dan tidak membahayakan selagi puntung rokok di buang jauh dan pada tempatnya, padahal kenyataannya adalah, bukan puntung rokok yang membahayakan kondisi SPBU tetapi asap dan abu yang ditimbulkan dari rokok dapat memicu percikan api kecil dan bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan kebakaran. Selain itu, larangan mengisi bahan bakar menggunakan jerigen atau selain tangki kendaraan, adalah dengan alasan, wadah plastic yang biasa digunakan masyarakat untuk membeli bensin eceran di SPBU mengandung listrik ringan yang dapat memicu ledakan seperti layaknya lampu LED pada telepon genggam. Sebagai area dengan banyak uap bahan bakar yang mudah meledak dan terbakar, sudah selayaknya penerapan K3 tidak menjadi hal yang tabu bagi masyarakat.

Meskipun sudah ada SOP dan aturan yang mengatur mengenai berbagai aspek pendukung penerapan SMK3 secara tepat dan berkala pada tiap SPBU, dengan mengacu pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pekerja SPBU yaitu dengan ijazah maksimal hanya sampai pada tingkat SMA/ sederajat bahkan ada yang hanya tamatan SMP serta membandingkan dengan kurun waktu pekerja operator membuat sikap para pekerja dalam menerapkan budaya K3 kurang disiplin.

X menjelaskan bahwa sudah tiga tahun bekerja sebagai operator mesin pompa SPBU di daerah Tlogomas, X menjelaskan tidak mengerti cara menggunakan alat pemadam kebakaran tersebut, meskipun X mengetahui banyak bagian-bagian alat maupun fasilitas di area SPBU

bagian pompa dan tangki BBM, ternyata tidak menjamin pekerja mengetahui secara menyeluruh tata cara menggunakan fasilitas dan alat lainnya. X menjelaskan bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, langkah awal yang dilakukannya adalah membaca keterangan penggunaan alat pemadam kebakaran yang ada dan berusaha menyelamatkan diri.⁷⁴

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, para pekerja SPBU dikecamatan Lowokwaru memberikan pernyataan beragam, pada SPBU Tlogomas, pekerja mengatakan bahwa selama 4 (empat) tahun bekerja, sudah mendapatkan 1 (satu) kali *training* dan 1 (satu) kali simulasi penanggulangan kebakaran. Sedangkan pekerja SPBU Sumbersari mengatakan, bahwa selama 2 (dua) tahun bekerja, telah mendapatkan 1 (satu) kali *training* dan 3 (tiga) kali simulasi penanggulangan kebakaran. Sedangkan pada SPBU Mojolangu, para pekerja hanya mendapatkan *training* berupa penjelasan mengenai penanggulangan kebakaran dan informasi mengenai SMK3 yang diterapkan di SPBU tanpa simulasi.

Masyarakat Indonesia umumnya, berperilaku dengan menganggap kebiasaan untuk menaati suatu aturan yang tidak memiliki sanksi adalah hal yang biasa. Kebiasaan menaati aturan akan dilakukan bilamana aturan tersebut memiliki sanksi kuat yang mengancam diri sendiri. Ketika tidak ada rekam jejak bukti yang dapat dipercaya secara nyata dari mengabaikan suatu aturan, maka aturan tersebut akan terus diabaikan. Disiplin serta ketertiban masyarakat dalam menaati aturan tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Derajat kepatuhan masyarakat menjadi salah satu

⁷⁴ Ibid

parameter tentang efektif atau tidaknya aturan tersebut berlaku. Elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu;

- a. Penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- b. Penyebab masyarakat yang tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat terkait serta fasilitas mencukupi.

Dengan jumlah masyarakat dan institusi pendidikan yang cukup padat di daerah kecamatan Lowokwaru pun memiliki pengaruh yang besar. Diharapkan masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan fasilitas SPBU agar dapat sadar akan potensi kebakaran yang akan dapat ditimbulkan bilamana rambu-rambu yang tertera di area SPBU tidak dilaksanakan dengan tertib. Sebab, ketentuan mengenai larangan tersebut tidak hanya sekedar agar efektif tapi juga lebih pentingnya adalah demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Rambu-rambu tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja saja, namun konsumen juga harus menaati tiap rambu yang tertera karena resiko kebakaran yang disebabkan oleh konsumen bisa kapan saja terjadi jika konsumen lalai.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa sesempurna apapun sebuah aturan hukum dan regulasi yang lengkap baik sarana maupun prasarana tidak akan memberikan manfaat dan tujuan bila masyarakat tidak menyadari untuk memenuhi aturan yang telah ditentukan tersebut. Banyak dijumpai konsumen yang mampu membaca namun tidak mampu menaati, demi membunuh waktu karena harus menunggu antrian untuk mengisi bahan bakar beberapa menit, konsumen dengan berani mengoperasikan

telepon genggam dalam keadaan mesin motor menyala dan berada beberapa meter dari pompa mesin pengisi bahan bakar.

Saat penulis mewawancarai salah satu konsumen di SPBU Mojolangu, konsumen bernama Said mengatakan, bahwa ia mengetahui rambu-rambu larangan yang tertera di berbagai sudut area SPBU, namun ia memberi pernyataan bahwa selama ini belum mengetahui alasan tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam di area SPBU sehingga ia menganggap rambu tersebut tidak begitu penting. Untuk faktor mengenai masyarakat dan kebudayaan memiliki kaitan satu sama lainnya, sebab kebudayaan merupakan hal yang dikerjakan dan dilakukan masyarakat. Dalam hal ini, kebiasaan membaca, kebiasaan untuk patuh terhadap aturan sulit diterapkan karena tidak adanya pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan.

Terdapat banyak ketidaksesuaian antara undang-undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis menemukan beberapa kasus tidak diterapkannya K3 secara disiplin ilmu guna kepentingan bersama. Diantara kasus tersebut adalah, sepeda motor yang diletakkan terus menerus secara sadar didalam tumpukan rak gas elpiji 12kg, menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran pekerja maupun *supervisor* dalam menjaga keamanan area SPBU dari bahaya ledakan dari sepeda motor yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, sangat banyak pekerja menggunakan sepatu pansus dan *sneakers* biasa. Para operator SPBU seringkali meletakkan hp, makanan maupun minuman tepat disekitar tangki bensin. Penulis juga mendapati lebih dari sembilan operator yang

tidak mengetahui tatacara menggunakan alat pemadam kebakaran, mereka menjelaskan bahwa supervisor maupun pengurus tidak pernah memberikan arahan tatacara menggunakan alat pemadam kebakaran tersebut. Hal-hal tersebut diatas terjadi, akibat kurangnya pengawasan petugas *safety* terhadap aturan yang telah berlaku.

Menegaskan bahwa tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, sarana dan prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya.

Upaya pelaksanaan suatu aturan hukum (undang-undang). Sebagai upaya pelaksanaan K3 bila dikaitkan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengurus maupun *supervisor* SPBU kecamatan Lowokwaru kota Malang telah menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang menunjang terciptanya suasana tempat kerja yang kondusif berupa⁷⁵:

1. Rambu-rambu larangan berupa; dilarang merokok, dilarang memotret, dilarang memainkan telepon genggam, mematikan kendaraan saat dilakukannya pengisian bahan bakar, dilarang menyalakan api dan dilarang merokok.

⁷⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan operator dan supervisor SPBU 5416510 Tlogomas kota Malang pada tanggal 19-21 September 2018.

2. Tersedianya alat pemadam kebakaran beserta petunjuk penggunaannya.
3. Pemasangan *fire alarm system* atau *fire hydrant*.
4. Penggunaan APD bagi setiap pekerja.

Dengan tersedianya beberapa macam penunjang sarana dan prasarana fasilitas tersebut, menunjukkan bahwa pengurus maupun *supervisor* SPBU kecamatan Lowokwaru kota Malang secara serius berupaya menegakkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, mengingat para pekerja dan *supervisor* sangat kurang disiplin dan menyadari akan pentingnya memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kebijakan penggunaan APD maupun menaati rambu-rambu larangan tersebut.

X menjelaskan bahwa sudah tiga tahun bekerja sebagai operator mesin pompa SPBU di daerah Tlogomas, X menjelaskan tidak mengerti cara menggunakan alat pemadam kebakaran tersebut, meskipun X mengetahui banyak bagian-bagian alat maupun fasilitas di area SPBU bagian pompa dan tangki BBM, ternyata tidak menjamin pekerja mengetahui secara menyeluruh tata cara menggunakan fasilitas dan alat lainnya. X menjelaskan bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, langkah awal yang dilakukannya adalah membaca keterangan penggunaan alat pemadam kebakaran yang ada dan berusaha menyelamatkan diri.⁷⁶

⁷⁶ Ibid

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, para pekerja SPBU dikecamatan Lowokwaru memberikan pernyataan beragam, pada SPBU Tlogomas, pekerja mengatakan bahwa selama 4 (empat) tahun bekerja, sudah mendapatkan 1 (satu) kali *training* dan 1 (satu) kali simulasi penanggulangan kebakaran. Sedangkan pekerja SPBU Sumpenari mengatakan, bahwa selama 2 (dua) tahun bekerja, telah mendapatkan 1 (satu) kali *training* dan 3 (tiga) kali simulasi penanggulangan kebakaran. Sedangkan pada SPBU Mojolangu, para pekerja hanya mendapatkan *training* berupa penjelasan mengenai penanggulangan kebakaran dan informasi mengenai SMK3 yang diterapkan di SPBU tanpa simulasi

Meskipun sarana telah dilengkapi, namun bila prasarana berupa pemaparan ilmu pengetahuan sebelum terjun ke lapangan tidak dipenuhi, pelaksanaan K3 akan sulit terlaksana dengan baik. Program berupa *training* guna memberikan pemahaman teori maupun praktik simulasi terhadap penanggulangan kebakaran adalah hal yang penting dilakukan agar sarana dan prasarana yang tersedia dapat berguna sesuai dengan kegunaannya.

Meskipun sarana telah dilengkapi, namun bila prasarana berupa pemaparan ilmu pengetahuan sebelum terjun ke lapangan tidak dipenuhi, pelaksanaan K3 akan sulit terlaksana dengan baik. Program berupa *training* guna memberikan pemahaman teori maupun praktik simulasi terhadap penanggulangan kebakaran adalah hal yang penting dilakukan agar sarana dan prasarana yang tersedia dapat berguna sesuai dengan kegunaannya. Dari sisi pengusahanya, beranggapan bahwa untuk menyediakan program pendukung pelaksanaan K3 hanya menambah pengeluaran perusahaan sehingga penerapan terhadap SMK3 tidak berjalan dengan maksimal.

D. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Penerapan SMK3 pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di kota Malang

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan faktor penghambat dari pelaksanaan SMK3 pada pekerja SPBU di kecamatan Lowokwaru kota Malang, maka dalam sub bab ini akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan pelaksanaan K3 pada pekerja SPBU di Kota Malang tersebut.

Dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan K3 pada pekerja SPBU kota Malang di kecamatan Lowokwaru yang muncul dari faktor internal, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *supervisor* SPBU menjelaskan bahwa pihaknya sebagai atasan melalui koordinasi dengan pengurus telah berupaya mengusahakan memenuhi aspek-aspek SMK3⁷⁷, yaitu dengan cara:

- a. Memberikan lebih dari satu titik rambu-rambu larangan di sekitar area SPBU dengan penjelasan kalimat beserta gambar.
- b. Mempekerjakan *security* guna memantau dan mendisplinkan para konsumen serta operator yang bekerja di area SPBU.
- c. Mendatangkan petugas infeksi HSE jangka 6 bulan sekali guna memberikan pemahaman terhadap pekerja dalam disiplin menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di area SPBU sebagai pendukung pelaksanaan K3 secara disiplin.

⁷⁷ Hasil wawancara

- d. Mengikutsertakan dan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan seluruh pekerja guna mendapatkan jaminan kesehatan.
- e. Melengkapi secara menyeluruh sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan pelaksanaan K3 seperti alat pemadam kebakaran dan tatacara penggunaannya. Dan menggupayakan simulasi rutin penanggulangan kebakaran dengan mendatangkan petugas *safety*, yaitu HSE dari PT. Pertamina.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah memberikan peringatan agar tidak mengabaikan rambu-rambu yang tertera pada area SPBU dengan memantau setiap pekerja dan konsumen menggunakan CCTV dan dengan cara menegur secara tegas dan langsung setiap mendapati konsumen maupun operator yang tidak disiplin. Pekerja SPBU pun harus sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari tindakan kurang disiplin melaksanakan K3 tersebut.⁷⁸

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan unit staf HSEU (Health Science Education Unit)⁷⁹ dari segi kesehatan, ketika mengisi bensin di SPBU, baik petugas pengisi bensin maupun konsumen, dapat terpapar uap bensin. Namun, orang yang bekerja di SPBU akan terpapar uap bensin lebih banyak dan lebih lama daripada konsumen, jika mengamati pola kerjanya hampir dapat dipastikan, para pekerja tersebut sebenarnya berisiko mengalami gangguan kesehatan mulai dari gejala

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Wawancara dengan unit staff HSEU yaitu Ibu Tutu S.Kep Ns. M.Kep sekaligus pengamat keselamatan kerja yang berkerja di Universitas Muhammadiyah Malang. pada 23 November 2018 pukul 14.30 WIB

ringan seperti pusing-pusing sampai dengan gangguan berat yakni kanker darah. Bensin (*gasoline*) adalah sebuah senyawa yang sudah tidak asing digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bensin tersebut dihasilkan dari minyak mentah (*crude oil*) pada proses pengilangan minyak. Bensin mempunyai rentang rantai karbon C6 hingga C11 dan merupakan campuran dari berbagai hidrokarbon, antara lain *butana, pentana, isopentana, benzen, alkilbenzen, toluen, dan xylene*.

Umumnya, Paparan akut uap bensin dapat menyebabkan iritasi ringan maupun berat, telinga berdengung, mual seperti ingin muntah, dada terasa nyeri, sukar untuk bernafas, denyut jantung tidak stabil, sakit kepala, lemah, mabuk, disorientasi, penglihatan terganggu, bendungan paru, gangguan darah, kelumpuhan, hingga kejang. Uap bensin juga dapat memberikan efek samping depresi seperti sistem saraf pusat, hidung, dan tenggorokan. Menghirup bensin dengan kadar tinggi dalam jangka waktu pendek (akut) juga dapat menimbulkan efek buruk terhadap sistem saraf. Efek yang disebabkan tersebut akan semakin terasa seiring dengan meningkatnya jumlah bensin yang terhirup⁸⁰. Prinsip 3S yang menjadi terapan PT.Pertamina saat ini, menjadi polemik, di satu sisi, memberikan nilai positif kepada para pelanggan. Namun di sisi lain, ada dampak negatif bagi para petugas SPBU. Ketika mengisi bensin, sering kali konsumen ngobrol dengan petugas pom bensinnya.

Melalui penelitian ini, sebagai pengamat ahli kesehatan kerja, ada beberapa rekomendasi baik terhadap Pertamina, Pemilik SPBU dan

⁸⁰ Ibid

Pihak Pemerintah (Disnaker). *Pertama*; Pihak SPBU harus melakukan pengukuran untuk mengetahui konsentrasi uap bensin di atmosfer. Hasil ini penting untuk diketahui untuk menentukan langkah pengendalian selanjutnya. Hasil pengukuran tersebut dievaluasi dengan membandingkan Nilai Ambang Batas (TLV). ACGIH (*Asosiasi Hygiene Industri Amerika*) menetapkan mengenai batas maksimal jumlah paparan uap bensin di udara dalam kurun waktu tertentu. Untuk 8 jam perhari, boleh terpapar maksimal 0,5 ppm (TLV-TWA). Artinya dengan konsentrasi 0,5 ppm ini, petugas masih relatif aman bekerja untuk selama 8 jam per harinya. Lalu, bagaimana bila hasil ukur melebihi ambang batas. Jika hasil ukurnya 2,9 ppm. ACGIH merekomendasikan boleh terpapar per harinya selama 15 menit. SPBU pada umumnya buka 24 jam dengan membagi 3 shift dengan lama kerja per hari, 9 sampai 8 jam. Jadi dengan demikian konsentrasi uap bensin di udara tidak boleh lebih dari 0,7 ppm.

Kedua; Petugas pom bensin terpapar dengan uap bensin salah satunya melalui jalur pernapasan sehingga untuk mencegah masuknya senyawa ini dengan cara menggunakan alat pelindung diri/masker. Penggunaan APD ini ditetapkan dalam bentuk SOP/prosedur pengisian bensin. Tentunya prosedur baru ini wajib disosialisasikan ke petugas. Untuk memastikan prosedur ini dijalankan dengan baik, pihak SPBU perlu menunjuk pengawas di lapangan. *Ketiga*; SPBU merupakan mitra bisnis Pertamina. Jadi, pihak Pertamina semestinya meninjau kembali persyaratan pengajuan pendirian sebuah SPBU. Persyaratan agar pihak SPBU mempunyai alat ukur konsentrasi uap bensin di atmosfer adalah sebuah keharusan mutlak

karena dengan alat ini akan diketahui berapa kadar konsentrasi uap bensin yang terhirup oleh petugas. Pembinaan dan pengawasan oleh Pertamina terhadap SPBU harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan terutama untuk memastikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah dijalankan oleh pihak SPBU.

Hal ini tentunya dibuatkan dalam bentuk sistem pengawasan, di mana di dalamnya juga mengatur pemberian sanksi bila ada pelanggaran. *Keempat*; Pihak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja tentunya tidak bisa lepas tangan, harus lebih proaktif mengawasi pihak SPBU dan Pertamina untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hak keselamatan dan kesehatan yang dimiliki pekerja, benar-benar diberikan oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Kegiatan seperti inspeksi dan audit K3 oleh Disnaker (Pegawai Pengawas K3) harus dilakukan secara reguler dan berkesinambungan meskipun bidang pengawasan ketenagakerjaan telah dipindahkan ke pemerintah provinsi, diharapkan agar tetap melakukan pengawasan dan peninjauan secara berkala. Upaya-upaya tersebut diharapkan diperhatikan secara berkala karena pekerja bukan hanya asset bagi perusahaan tetapi lebih dari itu sebagai partner oleh karenanya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mutlak diterapkan untuk menjamin hak selamat dan sehat pekerja telah terpenuhi.

Drs. Kasiyadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Malang menambahkan, meskipun pihaknya menyayangkan kebijakan mengenai

perpindahan bidang pengawasan ketenagakerjaan khususnya bidang K3, sebagai pemangku jabatan tertinggi bidang tenaga kerja di Kota Malang sekaligus Dosen salah satu universitas di Kota Malang, beliau menerangkan bahwa Standar Operasional Perusahaan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina Retail dari segi focus detail mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinilai kurang efektif karena tidak berimbang dari sisi para pekerja khususnya pekerja di bagian operator mesin pompa yang dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan bahan bakar kendaraan.

Penerapan SMK3 harus memperhatikan seluruh faktor resiko dan menekankan potensi sewaktu-waktu terjadi insiden di SPBU. Jika operator dan *Supervisor* dapat menerapkan HSE dan aspek operesional maka potensi kecelakaan kerja di SPBU dapat dikurangi, tetapi jika aspek fungsional para pekerja tidak dipenuhi secara maksimal penyakit akibat kerja akan muncul. Dibutuhkan tidak hanya materi dalam ruang, tetapi juga praktik mengenai penerapan manajemen tersebut.

Beliau menambahkan, bahwa menurutnya HSE yang diterapkan oleh PT. Pertamina Retail sebagai pengelola SPBU kurang cukup efektif, dan memerlukan penambahan mengenai wawasan sosialisasi berupa *training* mengenai pengetahuan pelayanan kepada konsumen, meskipun PT. Pertamina memiliki ketentuan standar dalam pelayanan, tetapi hal tersebut dirasa kurang menguntungkan dari sisi para pekerja.

Karena pekerja di jejak ketentuan bahwa harus mengerti banyak hal tetap minim pembelajaran. Dari segi penerapan SMK3 beliau menerangkan sudah cukup baik karena PT. Pertamina Retail memberikan standar yang sangat teliti dalam urusan keamanan. Ketepatan kualitas dan kuantitas pelayanan operator merupakan hal penting yang diperlukan oleh setiap pengguna jasa SPBU, namun standard dan program pelayanan yang menyelamatkan petugas pekerja SPBU adalah hal yang utama.

Beliau menambahkan, adanya sertifikasi untuk mengklasifikasikan tiap SPBU adalah yang baik sebagai kompetisi antar stasiun agar lebih berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun menitikberatkan pada slogan “Senyum, Sapa, Salam” kurang tepat karena membuat pekerja dipaksa nyaman dalam kondisi lingkungan yang tidak memberikan ruang kenyamanan dan keamanan, karena keterpaksaan menyebabkan kebiasaan dan membudaya, sehingga menyebabkan hal yang kurang baik menjadi hal yang dapat dimaklumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan hasil pengerjaan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Malang, maka kesimpulan yang penulis rangkum adalah sebagai berikut;

- a. Penerapan SMK3 pada SPBU di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah diterapkan dengan berlandaskan ketentuan dari Departemen HSE dari PT. Pertamina Retail dibawah naungan PT. Pertamina (Persero) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, namun belum cukup baik atau dapat dikatakan belum efektif diterapkan di SPBU Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan melihat kondisi yang ada dilaparang mengenai K3 baik dari segi pelaksanaan, perencanaan pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap kinerja dari K3 yang diterapkan tersebut.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan SMK3 pada SPBU di Kota Malang tersebut berdasarkan 3 hal; yaitu; *Substansi Hukumnya*, aturan yang telah ada tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Departemen HSE dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang

Penerapan SMK3 namun dalam pelaksanaanya, masih ada elemen-elemen yang tidak terlaksana dengan maksimal. *Struktur Hukum*, dari sisi pemerintahan, pindahnya kewenangan pengawasan tenaga kerja dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi menyebabkan beberapa perubahan dinamika dalam hubungan industrial. Selanjutnya, dari sisi petugas infeksi HSE yang menangani pemanatauan penerapan SMK3 tersebut belum maksimal dalam menjalankan tugas. Dimana masih seringkali didapati Petugas infeksi K3 tersebut tidak rutin melakukan pengawasan, pemberian pemahan maupun terhadap aktivitas-aktivitas pengendali mutu bahan bakar, kualitas pekerja, maupun pelaksanaan K3. *Kultur Hukum*, Meskipun sarana telah dilengkapi, namun bila prasarana berupa pemahan ilmu pengetahuan sebelum terjun ke lapangan tidak dipenuhi, pelaksanaan K3 akan sulit terlaksana dengan baik. Program berupa *training* guna memberikan pemahaman teori maupun praktik simulasi terhadap penanggulangan kebakaran adalah hal yang penting dilakukan agar sarana dan prasarana yang tersedia dapat berguna sesuai dengan kegunaannya. Dari sisi pengusahanya, beranggapan bahwa untuk menyediakan program pendukung pelaksanaan K3 hanya menambah pengeluaran perusahaan sehingga penerapan terhadap SMK3 tidak berjalan dengan maksimal.

B. Saran

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada *supervisor* SPBU, pekerja SPBU, dan konsumen SPBU guna

tercapainya pelaksanaan SMK3 pada pekerja SPBU. Berikut beberapa saran penulis:

1. Disarankan kepada pemerintah dan perusahaan terkait, dalam hal ini ada pihak Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Departemen HSE PT. Pertamina, untuk mengkaji serta memperbarui aturan serta ketentuan mengenai Penerapan SMK3 yang berlaku di Indonesia dan Managemen HSE PT. Pertamina, dimana Undang-undang tersebut sekiranya disarankan untuk memasukkan sanksi administratif maupun perdata bagi para perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 dengan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Sebab, tidak hanya pekerja di terminal BBM maupun kilang minyak yang memerlukan perlindungan terikait keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi juga para pekerja SPBU yang dalam keseharian selalu berhubungan dengan penditribusian bahan bakar ke konsumen secara langsung.
2. Disarankan kepada pekerja SPBU untuk sadar dan mulai mendisiplinkan diri untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan diri selama bekerja. Mematuhi segala aturan yang berlaku demi kepentingan bersama, serta menuntut pemenuhan hak sesuai yang tercantum dalam undang-undang guna kebaikan diri sendiri dan keberlangsungan area kerja yang aman dan sehat. Dan menegur rekan kerja yang acuh terhadap keselamatan dan kesehatan di area kerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1**, Kencana, Jakarta, 2010.
- Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Hamidi, **Metode Penelitian dan teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani **Penerapan Teori Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lawrence M. Friedman, **America Law: An Introduction (New York:W.W Norton and Company**, Lawrence M. Friedman, 1973, *A History of America Law*. New York, , 1984.
- Pusat bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Raida L Tobing, dkk, **Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional**, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sedarmayanti, **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Remaja Karya Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Seorjono Seokanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Soleman B Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press , Jakarta, 1993.
- Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, **Hukum Kerja Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.

INTERNET

berkabar.id, <https://www.berkabar.id/kabar/25502/dirut-bpjs-ketenagakerjaan-angka-kecelakaan-kerja-2017-naik-20> dan <https://finance.detik.com/moneter/d-3853101/angka-kecelakaan-kerja-ri-meningkat-ke-123-ribu-kasus-di-2017>, (8 November 2018 pukul 19.41 WIB), 2017.

International Labour Organization (ILO) Jakarta http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai sarana untuk produktivitas. Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 19.24 WIB.

PT. Pertamina, <https://www.pertamina.com/id/visi-misi-tujuan-dan-tata-nilai>, (13 September 2018 pukul 12.04 WIB), 2016.